

**FENOMENA POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI TERHADAP KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU
Perkawinan No. 1 tahun 1974) di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUTFIRAH
10300115115

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nutfirah
NIM : 10300115115
Tempat/Tgl.Lahir : Sungguminasa, 24 Januari 1997
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Gantarang Desa Taeng
Judul : Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap
Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Perbandingan
antara Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun
1974 No. 1 tahun 1974) di Desa Taeng Kecamatan
Pallangga Kabupaten Gowa.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 01 Agustus 2019

Penyusun,



NUTFIRAH
NIM.10300115115

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "FENOMENA POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974) DI DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA", yang disusun oleh NUTFIRAH, NIM:10300115115, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019 M, bertepatan dengan 29 Dzulkaidah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 01 Agustus 2019 M
29 Dzulkaidah 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	:	Dr. Muh. Sabir Maidin, M.Ag.	(.....)
Munaqasy I	:	Dr. H. Abd. Rahman H Qayyum, M. Ag.	(.....)
Munaqasy II	:	Dr. Awaliah Musgamy, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	:	Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	:	Dr. Kurniati, M.H.I	(.....)

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP.196210161990031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Pembimbing dan penguji penulisan skripsi saudara **NUTFIRAH, NIM: 10300115115**, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan Perkawinan No. 1 tahun 1974) di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa**". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan dalam persyaratan ke sidang ujian Munaqasayah (Akhir).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 23 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.
NIP. 19711013 200003 1 002

Dr. Kurniati, M.H.I.
NIP. 19740627 200604 2 002

Penguji I

Penguji II

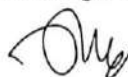


Dr. H. Abd. Rahman H. Qayyum, M.Ag.
NIP. 19681020 199703 1 002

Dr. Awaliah Musgamy, M. Ag.
NIP. 19750822 200604 2 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum



Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.
NIP. 19711013 200003 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita kejalan yang lurus seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Karya tulis ilmiah ini berbentuk skripsi dengan judul “Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan No. tahun 1974) di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”, merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan strata satu (S1) program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat peneulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda **Khaeruddin Nurdin** dan Ibunda **Kamsiah Nurdin** serta Adik-adik penulis **Nadirah**

Dwi Lestari, Nurul Fitriani dan Khaerul Fahmi Al-Farabi yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas pula penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu dan membimbing penulis dalam menempuh pendidikan sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir ini. Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang terdalam dan tek terhingga terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H Musafir Pababbari, M.SI.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak **Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.** selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Bapak **Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.** selaku pembimbing I dan Ibu **Dr. Kurniati, M.H.I.** selaku pembimbing II.

Terima kasih atas kesabaran dan kesediaan beliau dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, berupa tenaga serta pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak **Dr. H. Abd. Rahman H Abdul Qayyum, M.Ag** selaku penguji I dan Ibu **Dr. Awaliyah Musgamy, M.Ag** selaku penguji II yang memberikan kritikan dan saran yang membangun untuk penulis.

6. Seluruh Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang saya banggakan, yang tidak bisa disebut satu per satu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah memberikan balasan yang telah dilakukan.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2015 (**Justice**) serta terkhusus kepada teman-teman kelas **PMH C**. Terima kasih atas dukungan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini.
8. Kepada **Wiwi Andriani Safitri, Resky Amaliah, Nurpadillah Johang, Andi Siti Marwah Fauziah**. Terima kasih atas ukiran hati bertemakan persahabatan dan pertemanan yang tulus atas waktu yang telah dihabiskan bersama penulis, yang senantiasa ada untuk memberikan dukungan dan doa, serta kekeluargaan yang begitu besar.
9. Kepada **Chiby-chiby** yang telah membantu baik berupa pikiran dan semangat kepada penulis.
10. Seluruh teman **Kuliah kerja Nyata (KKN)** Angkatan 60 Desa Bonelemono Utara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu yang selalu mendukung selama menyusun skripsi ini. Terima kasih untuk sejuta memori, kenangan manis, dan banyak cerita, izinkan saya untuk merindu, sampai nanti kembali.
11. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Atas segala bantuan, berupa moril maupun materil yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi. Semoga jasa-

jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal disisi Allah Swt.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah dibrikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah Swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Sungguminasa, 03 Juli 2019

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Nutfirah
10300115115

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1-15
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
D. Kajian pustaka.....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS	16-36
A. Poligami Hukum Islam.....	16
1. Pengertian Poligami.....	16
2. Dasar Hukum Poligami	17
3. Hikmah Poligami.....	22
4. Syarat-Syarat Poligami.....	23
5. Poligami Menurut Hukum Islam	28

B. Poligami Menurut UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ...	31
1. Pengertian Poligami.....	31
2. Syarat-Syarat Poligami.....	32
3. Poligami Menurut UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37-44
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
B. Pendekatan penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengolahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45-79
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Penyebab Terjadinya Poligami di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.....	64
C. Dampak yang ditimbulkan dari Adanya Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap kehidupan Rumah Tangga di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa	68
D. Solusi Hukum Islam dan UU perkawinan No. 1 tahun 1974 terhadap Poligami yang terjadi di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa...	77
BAB V PENUTUP.....	80-81
A. Kesimpulan.....	80
B. Implikasi Penelitian.....	11

DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Mata Pencaharian Desa Taeng

Tabel 1.2 Usia Produktif

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 1.5 Agama Di Desa Taeng

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Tabel 1.7 Tingkat pendidikan

Tabel 1.8 Sarana Jalan Desa Taeng

Tabel 1.9 Sarana Ibadah

Tabel 1.10 Sarana Pendidikan

Table 2.1 Sarana Kesehatan

Tabel 2.2 Sarana Olahraga

Tabel 2.3 Struktur Pemerintahan

Tabel 12. Jumlah dan Jenis Kelembagaan di Desa Taeng



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	a	tidak dilambangkan
ب	ba	b	bc
ت	ta	t	tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	k	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup *Ta'marbutah* yang hidup (berharakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah*) dilambangkan dengan huruf "t". *ta'marbutah* yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainah*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمِرْتُ : *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللَّهُ دِينَ Dinullah billah

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasull

Inna awwala baitin wudii'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramaddaan al-lazii unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
Saw.	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

NAMA : Nutfirah
NIM : 10300115115
JUDUL SKRIPSI : Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974) di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan) di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dari pokok masalah tersebut dirumuskan beberapa sub masalah, sebagai berikut : 1) Bagaimana penyebab terjadinya poligami di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, 2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, 3) bagaimana solusi hukum Islam dan hukum UU perkawinan No. 1 tahun 1974 terhadap poligami yang terjadi di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: *Teologis Yuridis Normatif* dan *Syari'i*. Adapun sumber data penelitian ini adalah suami dan istri pertama. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya poligami yaitu jarak jauh antara suami dan istri, menurut nafsu semata dan kesempatan. Poligami yang terjadi di Desa Taeng banyak mendatangkan dampak negatif dari pada manfaatnya, diantara dampak negatif itu ialah mengabaikan hak-hak isteri dan anak, malu bergaul dengan masyarakat karena melakukan poligami tanpa izin isteri, dan dampak lainnya yaitu status perkawinan dengan isteri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Poligami dalam Islam sebenarnya menhadi aturan yang berlaku ketika darurat sosial, tidak dalam situasi normal dan darurat individual. Selain masalah pembagian harta, dalam UU tersebut jug mengatur penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan poligami. Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Taeng sangat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga perkawinan poligami khususnya di Desa Taeng dianggap hanya dapat mendatangkan penderitaan, kesengsaraan, dan kesedihan, karena rasa tanggung jawab suami terhadap hak-hak isteri dan anak mereka tidak terlaksana. Jika seperti ini yang sering terjadi, maka perkawinan poligami akan selalu memiliki wajah buruk dalam wacana perlindungan hak-hak isteri dan anak-anak mereka.

Implikasi dari penelitian ini adalah: Bagi yang ingin melakukan perkawinan poligami hendaklah berpikir beribu-ribu kali, karena secara umum perkawinan poligami itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik. Selain itu poligami juga mengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak. Terkadang dengan satu orang isteri saja kita sering juga dilanda oleh masalah-masalah dalam rumah tangga, lalu kita jadikan poligami sebagai solusinya justru akan menambah masalah baru. Secara akal sehat mengatakan jika satu isteri belum beres apalagi lebih dari satu malah akan lebih rumit lagi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk hewan, tumbuhan dan manusia. Berbeda dengan nikah, hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama, akan tetapi penggunaan keduanya sudah menjadi kata yang baku dalam penggunaan bahasa Indonesia (pernikahan atau perkawinan).¹

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.²

¹Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahman* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 9.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 18.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pengertian perkawinan yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.³

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering perbincangan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Di satu sisi ada pihak yang menolak poligami, dengan alasan yang bermacam-macam baik yang bersifat normatif, psikologis, dan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender, dan disisi lain ada juga yang menerima poligami sebagai sesuatu yang didukung sebagai jalan alternatif guna menyelesaikan permasalahan perselingkuhan, dan prostitusi, karena hukum alam berjalan berdasarkan keseimbangan pasangan yang sempurna.

Poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang wanita atau perkawinan yang banyak atau pemahaman tentang seorang laki-

³Rosdinar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h. 42-43.

laki yang membagi kasih sayangnya atau cintanya terhadap beberapa wanita dengan menyunting atau menikahi wanita lebih dari satu.⁴ Dalam poligami sering terdengar masalah-masalah yang sangat menyakitkan bagi perempuan, baik berupa kekerasan yang dilakukan oleh suami, maupun keadilan yang jarang tercipta di dalam keluarga yang diakibatkan oleh pernikahan poligami.

Dalam Islam dibolehkan untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat bagi seorang suami. Syarat tersebut adalah kebolehan menikah hanya pada empat orang istri dan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat berlaku adil tidak bisa dipenuhi oleh seorang suami, maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja. Ketentuan tentang poligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seorang suami yang melakukan poligami tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan proses menuju perkawinan poligami. Sangat jarang suami yang mengikuti prosedur hukum dalam mengajukan pernikahan ke Pengadilan Agama.

Masalah poligami dan nikah sirih merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena hal itu sering kali kita dengar bahwa ”kebanyakan orang yang berpoligami (beristri lebih dari satu) pasti melakukan nikah sirih (tanpa adanya perizinan dari istri pertama)”, karena hal tersebut dilakukan mengingat mudahnya cara itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan agama. Poligami dengan jalan nikah sirih ini merupakan hal yang paling sering dilakukan, karena kebanyakan para suami yang tidak ingin mengambil resiko yang lebih tinggi biasanya juga melalui prosedur yang ada, jarang sekali suami berhasil berpoligami, hal ini disebabkan terlalu

⁴Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi SAW* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 3.

rumitnya prosedur berpoligami. Mungkin yang terberat adalah meminta izin dari istri, sebab rata-rata seorang istri tidak mau dirinya di madu dan mungkin istri malah minta cerai. Dalam hal ini QS Al-Nisa/4:3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ

Terjemahannya :

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.⁵

Ayat diatas menjelaskan adanya kebolehan berpoligami sampai batasan empat orang istri saja. Kebolehan menikahi perempuan sampai batas maksimal empat orang itu mempunyai syarat yang berat, Allah di atas, "*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat*". Dari penggalan ayat ini dapat ditarik dua garis hukum. *Pertama*, bahwa al-Qur'an menganut asas monogami. *Kedua*, kebolehan berpoligami ditentukan dengan syarat yang sangat berat, yaitu sanggup berlaku adil kepada para istri. Adil, dalam nafkah, kasih sayang, giliran. Dan untuk berlaku adil Allah SWT memperingatkan secara tegas di dalam QS Al-Nisa 4:129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 77.

Terjemahannya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.⁶

Dari ayat di atas, sebenarnya Allah tidak menginginkan berpoligami, karena poligami itu mengandung risiko yang sangat besar terhadap kebahagiaan hidup rumah tangga. Poligami pada umumnya tidak didasari kepada pertimbangan-pertimbangan logis diperbolehkannya poligami, tetapi justru lebih didorong oleh kecerobohan dan nafsu serakah kaum pria, dan tanpa mengindahkan faktor keadilan sebagaimana disyaratkan oleh al-Qur'an tersebut. Akibatnya terjadilah hubungan yang tidak harmonis antar istri-istri atau antara anak dengan anak dan bahkan antara istri dengan anak.

Di Indonesia masalah Poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam Pasal 3 yang bunyinya: *"Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."*⁷

Akan tetapi, undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius/sengketa. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagai mana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yakni: *isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri*

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 99.

⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 96.

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan tersebut bersifat *fakultatif* dan bukan bersifat imperative-kumulatis, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.⁸

Kemudian persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 adalah *harus ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri, harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*⁹

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bersifat *komulatif*, artinya Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah hanya dapat member izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus menolak permohonan tersebut.

Dari ketentuan-ketentuan peraturan tersebut tampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan yang sangat berat, tidak hanya kesanggupan berlaku adil, tetapi di perlukan pula persetujuan dari istri terdahulu.

⁸Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 90.

⁹Hidayah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya* (Cet VII; Bandung: Remaja Rosdakarya Offest 1994), h. 90.

Disini tampak sekali bahwa Undang-Undang sangat mempersulit bagi seseorang untuk melakukan poligami.¹⁰

Namun, pernikahan poligami yang terjadi di Desa Taeng ini sering dilakukan dengan jalan pintas melalui prosedur agama dan pernikahan di bawah tangan, akibatnya selalu menuntut istri untuk menerima kehadiran istri kedua dari suaminya. Poligami yang tidak seimbang, artinya tidak adanya konsep keadilan dalam pernikahan poligami, akan mengakibatkan kecemburuan sosial anatar istri bahkan menimbulkan perselisihan antara keluarga.

Dengan melihat latar belakang permasalahan pada masyarakat di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa maka penulis tertarik tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974) di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka pokok masalahnya adalah bagaimana Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974) di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dari pokok masalah tersebut maka peneliti membagi dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

¹⁰Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, h. 90-91.

1. Bagaimana penyebab terjadinya poligami di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa ?
3. Bagaimana solusi hukum Islam dan UU perkawinan No. 1 tahun 1974 terhadap poligami yang terjadi di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

- a) Fenomena Poligami tanpa Izin Istri terhadap Kehidupan Rumah Tangga
- b) Hukum Islam
- c) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974

2. Deskripsi Fokus

- a) Fenomena Poligami

Masalah poligami yang terjadi di Desa Taeng menjadi topik dan bahan pembicaraan masyarakat yang tidak ada habisnya, sebab sebagian besar yang melakukan poligami di Desa Taeng ini merupakan poligami yang sifatnya tidak resmi, artinya tidak melakukan prosedur bahkan mereka melakukan poligami secara tersembunyi.

- b) Penyebab

Biasanya orang yang ingin melakukan poligami sering mengambil keputusan yaitu dengan adanya suatu permasalahan dalam suatu hubungan perkawinan mereka. Namun dalam penelitian ini berdasarkan pengamatan, tidak semua perkawinan poigami dilakukan berdasarkan sesuatu hal yang

dapat dikategorikan bolehnya melakukan poligami, penyebab terjadinya poligami yaitu: jarak jauh antara suami dan istri, menurutkan nafsu semata dan kesempatan.

c) Dampak

Poligami yang terjadi di Desa Taeng banyak mendatangkan dampak negative daripada manfaatnya, dampak yang terjadi yaitu: istri merasa sakit hati, hilangnya rasa kasih sayang istri dan anak akana merasa malu, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan timbulnya rasa benci pada anak.

d) Hukum Islam

Dalam Islam diperbolehkan menikahi batasan empat orang istri, tetapi memberikan ketentuan bahwa kebolehan tersebut berlaku adil kepada istri dan anaknya.

e) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974

Masalah poligami Poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974,yang berbunyi:”*pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*”. Dan harus mememnuhi syarat-syarat dan prosedur.

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
<p>a. Fenomena Poligami tanpa Izin Istri terhadap Kehidupan Rumah Tangga</p> <p>b. Hukum Islam</p> <p>c. UU Perkawinan No. 1 tahun 1974</p>	<p>a. Masalah poligami yang terjadi di Desa Taeng menjadi topic dan bahan pembicaraan masyarakat yang tidak ada habisnya, sebab sebagian besar yang melakukan poligami di Desa Taeng ini merupakan poligami yang sifatnya tidak resmi, artinya tidak melakukan prosedur bahkan mereka malukkan poligami secara tersembunyi.</p> <p>b. Biasanya orang yang ingin melakukan oligami sering mengambil keputusan yaitu dengan adanya suatu permasalahan dalam suatu hubungan perkawinan mereka. Namun dalam penelitian ini berdasarkan pengamatan, tidak semua perkawinan poigami dilakukan berdasarkan sesuatu hal yang dapat dikategorikan bolehnya melakukan poligami, penyebab terjadinya poligami yaitu: jarak jauh anantara suami dan istri, menurutukan nafsu semata dan kesempatan.</p> <p>c. Poligami yang terjadi di Desa Taeng banyak mendatangkan dampak negative daripada manfaatnya, dampak yang terjadi yaitu: istri</p>

	<p>merasa sakit hati, hilangnya rasa kasih sayang istri dan anak akana merasa malu, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan timbulnya rasa benci pada anak.</p> <p>d. Dalam Islam diperbolehkan menikahi batasan empat orang istri, tetapi memberikan ketentuan bahwa kebolehan tersebut berlaku adil kepada istri dan anaknya.</p> <p>e. Masalah poligami Poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974,yang berbunyi: "<i>pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami</i>". Dan harus mememnuhi syarat-syarat dan prosedur.</p>
--	---

D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran kajian pustaka yang penyusun lakukan, penyusun menemukan beberapa karya yang mengulas permasalahan ini antara lain:

1. Muhammad Yahya, dalam bukunya *“Poligami Dalam Prespektif Hadis Nabi SAW”* dalam buku ini berisi tentang hadis-hadis nabi dan berbagai tinjauan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dan juga poligami sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam buku ini merupakan bagian dari jawaban terhadap pencelaan oleh para orientalisi terhadap praktek poligami Rasulullah Saw yang meliputi perbandingan antara pandangan pandangan orientalis dengan ulama tentang poligami, selanjutnya hadis-hadis yang berkaitan dengan keadilan Rasulullah Saw.¹¹ Sehingga peneliti tertarik mengambil buku ini sebagai rujukan untuk memahami poligami dalam prespektif hukum Islam.
2. M. Anshary, dalam bukunya *“Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial”* buku ini membahas tentang masalah krusial dalam hukum perkawinan yang kerap menjadi kontroversial dan perdebatan dalam masyarakat. Misalnya kedudukan hukum talak tiga sekaligus, harta gono-gini, nikah keran hamil “kecelakaan”, nikah sirih, poligami, sengketa hak pemeliharaan anak, pengangkatan anak dan masalah penitng lainnya.¹² Namun pembahasan mengenai poligami, belum ada yang spesifik yang menyangkut hal tersebut.

¹¹Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Prespektif Hadis Nabi SAW* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 6.

¹²Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, h. 85.

3. Mardani, dalam bukunya *“Hukum Keluarga Islam di Indonesia”* buku ini membahas tentang hukum keluarga, khususnya membahas tentang hukum perkawinan. Dan beberapa peraturan yang menjadi dasar berlakunya hukum keluarga di Indonesia.¹³ Namun dalam buku ini belum membahas secara rinci tentang poligami dan belum memuat dalil-dalilnya.
4. Abdillah Mustari, dalam bukunya *“Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam”* dalam buku ini menjelaskan bahwa prinsip pokok dalam ajaran Islam, prinsip pokok tersebut terlihat dalam hukum perkawinan antara lain: pola relasi suami istri dalam pernikahan, kewenangan wali dan ijbarnya dalam nikah, interpretasi iddah dalam masa berkabung, interpretasi poligami dalam dimensi sosial, interpretasi pemutusan ikatan perkawinan dan interpretasi *Nusyuz*.¹⁴ Namun dalam buku ini belum spesifik membahas tentang poligami.
5. Soedharyo Soimin, dalam bukunya *“Hukum Orang-Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat”* dalam buku ini menjelaskan bahwa perikatan perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan keturunan mereka.¹⁵ Dalam buku ini belum menjelaskan poligami menurut hukum Islam.

¹³Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia*, h. 95.

¹⁴Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), 169.

¹⁵Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 4-6.

6. Beni Ahmad Saebani, dalam bukunya *“Fikih Munakahat 2”* dalam buku ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan semata-mata penghalalan hubungan seksual suami-istri. Perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami-istri. Seorang suami berkewajiban membangun rumah tangga dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan suaminya dengan memelihara pergaulannya dan menjaga auratnya dengan dasar-dasar syariat dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya.¹⁶ Dalam buku ini sangat membantu dalam mengungkapkan poligami dalam Hukum Islam dan Poligami menurut UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penyebab terjadinya poligami di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa.
- b. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa.
- c. Mengetahui solusi hukum Islam dan UU perkawinan No. 1 tahun 1974 terhadap poligami yang terjadi di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa.

¹⁶Beni ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat II* (Cet V; Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), h. 151.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Agar dapat memahami sekaligus mendapatkan kedudukan hukum yang pasti tentang poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga baik dari hukum Islam maupun UU Perkawinan.
- b. Penelitian ini sebagai bahan pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- c. Agar kita memahami pengertian poligami dalam dua hal, yaitu tinjauan hukum Islam dan Tinjauan UU Perkawinan yang menerangkan tentang izin poligami.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Poligami Menurut Hukum Islam*

1. Pengertian Poligami

Dari bahasa Yunani dari kata “*poli*” atau “*polus*” yang artinya “banyak” dan kata “*gamain*” atau “*gamos*” yang bermakna “kawin” atau “perkawinan”. Karena itu jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam arti yang terbatas, atau seorang laki-laki mempunyai pasangan lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan atau seorang istri mempunyai banyak suami dalam waktu yang sama. Istilah lain poligami di Indonesia disebut permaduan atau bermadu.¹

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan, bukan saat ijab kabul melainkan dalam menjalani hidup keluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata poligami sendiri tidak lazim dipakai.²

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih

¹Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*, h. 169.

²Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 64.

dari sembilang istri poligami dengan batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang.³

2. Dasar Hukum Poligami

Dan untuk mengetahui kedudukan poligami dalam Islam, di sini dijelaskan adanya ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan dibolehkannya berpoligami.

a) Al-Qur'an

Allah berfirman QS Al-Nisa/4:3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Terjemahannya :

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁴

Ayat diatas menjelaskan adanya kebolehan berpoligami sampai batasan empat orang istri. Selanjutnya ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa kebolehan tersebut berlaku dengan syarat yakni “berlaku adil kepada mereka (istri dan anak)”. Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa seorang pria yang mampu berlaku adil boleh mengawini perempuan yang ia senangi; dua, tiga atau empat (berpologami). Akan

³Muhammad Yahya, *Poligami dalam Prespektif Hadis Nabi Saw*, h. 3.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 77.

tetapi apabila kuatir tidak mampu berlaku adil maka cukup satu istri saja. Ayat ini tidak secara tegas membolehkan atau melarang berpoligami kecuali menetapkan sebuah syariat yaitu mampu berlaku adil. Allah Swt, justru menyertahkan pilihan itu pada pria, apakah ia mau melakukannya atau tidak.⁵

Maksudnya berlaku adil dalam berpoligami adalah persyaratan yang paling utama dianjurkan oleh Allah Swt dan yang telah diperaktekkan oleh Rasulullah, yakni di dalamnya telah mencakup pemenuhan seluruh kebutuhan keluarga meliputi kecukupan ekonomi dan mampu membagi waktu dan pemberian perhatian dengan penuh kasih sayang yang seadil-adilnya. Allah Swt memerintahkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan hak-Nya, maupun hak-hak sesama manusia.⁶ Namun kebanyakan seorang suami akan merasa kesulitan untuk berlaku adil terhadap para istrinya. Hal ini sebagai disinyalir dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam QS Al-Nisa/4:129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا



Terjemahannya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri

⁵Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*, h. 175-176.

⁶Muhammad Yahya, *Poligami dalam perspektif Hadis Nabi saw*, h. 121.

(dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷

Tafsiran ayat diatas menjelaskan ketidak mungkin seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam berpoligami. Dalam kitang dengan kebolehan poligami, yakni berlaku adil, merupakan hal yang sangat subyektif. Seorang suami boleh saja mengaku berlaku adil, namun dalam kenyataanya tidak. Sebab, mampu berlaku adil adalah sebuah sifat yang sangat sulit diwujudkan.⁸

Berdasarkan tafsiran kedua ayat diatas, ada suatu kelompok yang takut berbuat sewenang-wenang terhadap harta anak-anak yatim, namun tidak takut berbuat lalim terhadap istri-istri mereka. Kemudian ada yang mengatakan kepada mereka “sebagaimana kalian takut bilamana tidak dapat berbuat adil pada anak-anak yatim, begitu juga kalian harus takut bilamana tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istri kalian”. Janganlah kalian mengawini wanita kecuali satu saja sampai berjumlah empat dan jangan sampai lebih. Jika kalian masih merasa takut tidak dapat berbuat adil di dalam berpoligami, maka cukup satu istri saja. Janganlah kalian menikah kecuali jika kalian yakin tidak akan berbuat lalim terhadap satu wanita atau budak yang kamu miliki.⁹

b) Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹⁰

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 99.

⁸Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam*, h. 176.

⁹M. Haitsam al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern* (Erlangga, 2007), h. 227.

¹⁰Al-Azhar, *Dar al-Kutub Al-Islamiyah*, Bulugul Maram (Jakarta: Publisher, t, th) Juzu' 3: 222.

Artinya :

Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin (menafkahi), maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan. (HR. Bukhari Muslim)

Dalam hadis lain Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَنَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا خَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَاءٍ.¹¹

Artinya:

Dari Abu hurairah ra. Dari nabi Saw bersabda, “Barang siapa punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat dengan badan miring. (HR. Abu Daud Tirmidzi).

Rasulullah Saw bersabda:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: أَهْمَ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَأْمِنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي الْقَلْبَ.¹²

Artinya:

Rasulullah Saw. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa, “ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah engkau mencelaiku tentang apa yang engkau kuasai, sedangkan kau tidak menguasainya”. Abu Daud berkata “yang dimaksud dengan engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya, adalah “hati”.

Hadis tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagaian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berta sebelah dala menggaulinya yang berrati mengurangi haknya, tapi tidak dilarang untuk mencintai perempuan yang satu dari pada lainnya.

¹¹Kitab Sunan Abu Daud, *Bab Nikah Hadis 2133*, h. 415.

¹²Taqyudin Abu Bakar, *Kifayat al-akhyar fi halli ghayat-al ikhtisthar*, Dar al-kahir (Damaskus: Dar-al khair), cet I, h. 338.

Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah Saw menyuruh setiap kaum laki-laki supaya menikah, tetapi dengan syarat sanggup mengeluarkan nafkah kepada istrinya. Andaikan mereka tidak berkemampuan, maka tidak disarankan menikah walaupun dia seorang yang sehat lahir serta batinnya.

Sebagian ulama menyebutkan bahwa poligami itu mubah (dibolehkan) selama seseorang mukmin tidak akan khawatir akan aniaya (tidak jujur) atau karena istri mandul yang sudah diupayakan berobat dan madulnya itu karena kondisi istri atau karena istri sakit yang dengan sakitnya itu menghalangi terjadinya hubungan seks.¹³

Berdasarkan *asbabun nuzul* ayat, maka konteks ayat yang memperbolehkan poligami ini sesungguhnya lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan anak-anak yatim sehingga bisa hidup layak. Dengan demikian mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama, sehingga isu krusial dalam al-Quran tentang masalah poligami adalah keadilan terhadap anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya. Dalam berbagai literature fikih klasik eksistensi dan kebolehan poligami di dalam al-Qur'an, hampir tidak ada ulama yang menolak kebolehan poligami, bahkan seluruh ulama, baik yang klasik maupun modern, akan. Jika dilihat dari aspek hukumnya, poligami hanyalah merupakan tindakan hukum dalam kategori *ibahah* (boleh), bukan *sunah* apalagi *wajib*. Di samping itu, ayat-ayat yang membicarakan kebolehan poligami juga sangat sedikit jumlahnya dalam al-Quran.¹⁴

¹³Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, h. 65.

¹⁴Fatimah Zuhrah, "Problematisasi Hukum Poligami di Indonesia". *Jurnal Islam dan Sains*, vol. 3 no. 01 (Juni 2016), h. 28.

3. Hikmah Berpoligami

Berpoligami merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam agama, ada beberapa hikmah yang terkandung dalam poligami:

- a. Tidak dapat dipungkiri, bahwa bahtera kehidupan pernikahan seseorang tidak selalu berjalan dengan mulus, kadang-kadang ditimpa cobaan atau ujian. Pada umumnya, sepasang lelaki dan perempuan yang telah menikah tentu saja sangat ingin segera diberikan momongan oleh Allah Swt. Akan tetapi, kadang-kadang ada suatu keadaan ketika sang istri tidak dapat melahirkan anak, sementara sang suami sangat menginginkannya. Pada saat yang sama, suami begitu menyayangi istrinya dan tidak ingin menceraikannya. Dengan demikian, maka berpoligami adalah suatu solusi yang paling tepat untuk memperoleh keturunan dan juga istri yang pertama masih bisa membagi kasih sayang dengannya.¹⁵
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.¹⁶
- c. Ada juga kenyataan lain yang tidak dapat dipungkiri, bahwa di dunia ini ada sebagian lelaki yang tidak cukup hanya dengan satu istri (maksudnya, ia memiliki syahwat lebih besar dibandingkan dengan lelaki pada umumnya). Maka berpoligami adalah suatu jalan penyelesaian bagi sebahagian lelaki tersebut. Jika ia hanya menikahi satu wanita, hal itu justru dapat menyakiti

¹⁵Muhammad Yahya, *Poligami dalam Prespektif Hadis Nabi SAW*, h. 25.

¹⁶Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 136.

atau menyebabkan kesulitan bagi sang istri. Dan akan mengakibatkan perzinaan.

- d. Fakta lain yang kita hadapi sekarang adalah jumlah lelaki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah lelaki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perempuan, baik karena terjadinya banyak peperangan ataupun karena angka kelahiran perempuan memang lebih banyak daripada lelaki. Oleh sebab itu banyak wanita yang tidak kebagian suami, ditakutkan dari kaum wanita sebagai pelampiasan nafsu biologisnya menjurus kepada tindakan-tindakan asusila. Dan sebagainya, maka berpoligami merupakan solusi bagi wanita.¹⁷

4. Syarat-Syarat Poligami

Allah SWT telah mensyariatkan poligami untuk umatnya. Dalam hal ini, Islam telah membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini: faktor jumlah, faktor nafkah, dan faktor keadilan para isteri-isteri.¹⁸

a. Jumlah Maksimal Yang Dbolehkan

Syarat ini telah disebutkan oleh Allah SWT dengan firman-Nya: “Maka menikahlah dengan siapa yang kamu inginkan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga, atau empat.”(QS. An-Nisa’/ 4:3).

Ayat tersebut menerangkan dengan jelas bahwa Allah telah menetapkan seseorang itu menikah tidak boleh lebih dari empat orang istri. Jadi, Islam membatasi kalaumtidak beristri satu, boleh dua,tiga, atau empat saja.¹⁹

¹⁷Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2006.), h. 136.

¹⁸Musfir al-jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.99.

Diriwayatkan dari Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi bahwa dirinya memiliki sepuluh orang isteri. Ketika masuk Islam, Rasulullah saw berkata: ”Pilih empat orang dan ceraikan lainnya”. Naufal bin Mua’wiyah berkata: “Tatkala aku masuk Islam, aku memilki lima orang isteri. Kemudian Rasulullah berkata: ceraikanlah yang satu, dan pertahankan yang empat”.

Kemudian setelah Islam datang, dasar-dasar dan syarat poligami di atur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan maksimal untuk berpoligami adalah empat orang isteri dan di tekankan prinsip keadilan di antara para isteri-isteri dan anak-anaknya.

Menurut Abdur Rahman al-Ghazaly, M.A hikmah dilarangnya menikahi lebih dari empat isteri adalah:

- 1) Batas maksimal bagi manusia biasa untuk melakukan poligami adalah empat orang isteri. Jika lebih dari empat isteri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan fisik, mental, maupun tanggung jawab, sehingga nantinya akan repot sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya menimbulkan gangguan jiwa (stres).
- 2) Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret atau cenderung melakukan kezhaliman (aniaya), baik terhadap dirinya sendiri maupun isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Manusia pada umumnya di dominasi oleh nafsu syahwatnya yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-hak isteri dan anak-anaknya.²⁰

¹⁹Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 114.

²⁰Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 140.

b. Kemampuan Memberi Nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan maka pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi perempuan yang akan di nikahi tersebut. Menurut Syariat Islam, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi isteri, maka dia belum boleh kawin

Berdasarkan Syara' seorang laki-laki belum boleh menikahi jika belum mampu memberi nafkah. Begitu juga laki-laki yang sudah mempunyai satu orang isteri tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka laki-laki yang seperti itu tidak boleh berpoligami.²¹

Kesimpulan dari kemampuan zahir atau lahir ialah :

- 1) Mampu memberi nafkah seperti pakaian dan makan minum
- 2) Mampu menyediakan tempat tinggal yang wajar
- 3) Mampu menyediakan kemudahan yang wajar seperti pendidikan.
- 4) Sehat tubuh badannya dan tidak berpenyakit yang bisa menyebabkan Ia gagal dalam memenuhi tuntutan zahir yang lain.
- 5) Mempunyai kemampuan dalam hubungan suami istri.²²

c. Berlaku Adil Terhadap Para Isteri-isteri

Adil dalam pengertian umum merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh seorang muslim, karena semua aspek kehidupan tidak bisa tegak ketika nilai

²¹Musfir al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, h. 56.

²²Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, h. 122.

keadilan tidak hadir di dalamnya. Dalam masalah poligami keadilan merupakan nilai yang paling urgen dalam menciptakan keharmonisan keluarga, seakan-akan dasar atau landasan dibolehkan atau tidaknya poligami adalah bagaimana seorang suami itu mampu menegakkan keadilan. Hal ini bisa kita lihat dari firman Allah Swt. “*Dan apabila kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja*”. Ini merupakan suatu penegasan yang sangat gamblang untuk menunjukkan urgensinya keadilan dalam membina rumah tangga.²³

Nilai keadilan haruslah ditegakkan di dalam pembinaan keluarga, lebih-lebih dalam keluarga yang berpoligamis. Berlaku adil di sini merupakan sesuatu esensi untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam sebuah keluarga. Keadilan juga merupakan dasar utama di mana tonggak-tonggak kewajiban suami-isteri ditegakkan di atasnya. Maka suami yang tidak berlaku adil dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga dan para isteri seperti menggilir, memberi nafkah, dan lain-lainnya, maka suami yang demikian itu akan mendapatkan sanksi dan menanggung akibatnya hari pembalasan nanti.

Surat An-Nisa’ ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu di wujudkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara isteri-isteri dalam urusan sandang, pangan, tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.²⁴ Sementara itu Allah Swt juga menyebutkan dalam surat yang sama ayat 129 bahwa manusia tidak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri.

²³Tim Almanar, *Panduan Syar’i Menuju Rumah tangga Islami* (Bandung: Cipta Media, 2003), h. 111.

²⁴Musfir al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, h. 58.

Berdasarkan kedua ayat tersebut di atas dapat di pahami bahwa suami dapat berlaku adil:

- 1) Adil memberi nafkah
- 2) Adil dalam menyediakan tempat tinggal
- 3) Adil dalam giliran

Hal ini diterangkan dalam firman Allah Swt QS Ar-Ruum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁵

Andaikan suami tidak bisa bersikap adil, maka Ia akan berdosa dan akan mendapatkan siksaan dari Allah Swt pada hari kiamat dengan tanda-tanda pinggangnya miring. Hal ini disaksikan oleh seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai ke anak cucunya.

Dalam tafsir al-Manar jilid 4 halaman 349 Syekh Muhammad Abduh berkata “Barang siapa yang memperhatikan kedua ayat itu (ayat 3 dan ayat 129 surat an-Nisaa’), maka dapat dipahami bahwa poligami dalam Islam satu hal yang amat

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 406.

disempitkan, seakan-akan poligami itu suatu keadaan darurat yang hanya dibolehkan bagi orang yang terpaksa dan meyakini bahwa dirinya sanggup berlaku adil”.²⁶

5. Poligami Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di masyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin, ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.²⁷

Kita boleh memperdebatkan soal syarat keadilan dalam berpoligami, tetapi tidak boleh mengharamkan poligami. Karena poligami dalam syariat Islam bermula dari ayat-ayat yang bersifat perintah, karena itu menolak keberadaan poligami apalagi mengharamkannya adalah tidak boleh. Soal senang atau tidak dengan poligami, itu adalah persoalan selera saja, bukan persoalan hukum. Persoalan hukum (syariat Islam) sudah jelas kebolehan walaupun mempersyaratkan keadilan. Namun, Allah melarang suami berpoligami untuk lebih menyayangi dan menyenangkan istri yang satu dan membiarkan istri-istri yang lain.²⁸

Syariat Islam tidak menjadikan tatanan poligami sebagai suatu kewajiban yang tidak terelakkan bagi laki-laki Muslim, dan tidak pula mewajibkan kepada perempuan atau keluarganya untuk menerima pinangan seorang laki-laki Muslim

²⁶Humaidah Tatapangarsa, *Hakikat Poligami Dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, 1977), h. 26.

²⁷Beni ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* II, h. 152.

²⁸Thohir Luth, *Syariat Islam Menjawab Pertanyaan Umat sebuah Konfigurasi Tanya Jawab Seputar Fiqih Realitas di Indonesia* (Cet. I; Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h. 86.

yang sudah mempunyai seorang isteri atau lebih. Hanya saja syariat Islam memberi kebebasan kepada kaum perempuan untuk menerima atau menolaknya.²⁹

Islam membatasi jumlah istri sampai empat dengan memberikan hak-hak sah kepada masing-masing istri dan membuat laki-laki bertanggung jawab secara hukum kepada setiap istrinya dan karenanya dari mereka lahir anak-anak yang sah dan terhormat dimata masyarakat dan hukum.

Dalam syariat Islam, poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu:

1. Terhalangnya reproduksi generative, misalnya kemandulan;
2. Istri tidak berfungsi sebagai istri;
3. Suami yang hiperseks sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri;
4. Jumlah perempuan melebihi laki-laki;
5. Istri yang menyuruh suami berpoligami (jumlah terkecil di dunia).³⁰

Dalam syariat Islam, poligami terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yang menegaskan bahwa untuk laki-laki yang merasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada perempuan yatim, diperintahkan untuk menikahi perempuan yang dia sukai, dua orang istri atau tiga atau empat. Apabila tidak mampu berlaku adil, menikahlah dengan hamba sahaya. Perbuatan demikian demikian lebih baik dibandingkan dengan melakukan kezaliman.

Menurut Khazin Nasyuha, yang dimaksudkan dengan keadilan dalam bergilir poligami dalam soal materi, yakni adil dalam membagi waktu gilir, adil memberi

²⁹Butsainan as-Syyid al-Iraqy, *Rahasia Perkawinan yang Bahagia* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 201.

³⁰Beni ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat II*, h. 152.

nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya. Keadilan batiniah, menurut Khazin Nasuha, tidak dituntu oleh syariat Islam, karena masalahnya berada di luar kemampuan manusia. Rasulullah sendiri cenderung rasa cintanya kepada Aisyah dibandingkan kepada istri lainnya.³¹

Menurut Sayyid Sabiq, poligami adalah satua ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki kecenderungan seksual lebih besar dibandingkan dnegan perempuan. Secara genetic, laki-laki dapat memberikan benih kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Juka perempuan melakukan poliandri, itu bukan hanya bertentangan dengan kodratnya, lebih jauh lagi sangat naif dan rasional. Dari sisi gentik, akan sulit mencari dari benih siapa yang dibuahkan oleh perempuan yang hamil tersebut. Dengan demikian, syariat islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki. Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, Allah Swt mewajibkan kepada semua laki-laki yang poligami untuk berlaku adil, terutama dalm hal melakukan pembagian nafkah lahir maupun batin. Tidak dibenarkan menzalim istri lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya saja. Hal demikian menurut Sayyid Sabiq, karena hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Akan tetapi, poligami adalah untuk menghindari kaum laki-laki melakukan perzinaan, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangga.³²

³¹Beni ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat* II, h. 153.

³²Beni ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat* II, h. 154.

Islam melarang membagi-bagi peran istri dalam rumah tangga seperti, istri untuk penjaga harta, untuk merawat tubuh, untuk kesenangan untuk pemberi keturunan. Di dalam poligami islam, semua istri adalah istri resmi para istri memiliki status, kedudukan, hak dan kewajiban yang setara dalam rumah tangga. Tidak ada perbedaan status antara istri pertama dengan istri lainnya. Demikian juga dengan anak-anak yang dilahirkannya, anak dari istri pertama, kedua, ketiga dan keempat semua mempunyai status dan hak yang sama baik dari segi nafkah maupun masalah warisan. Adanya empat istri dalam perkawinan poligami Islam bukan berarti terbentuknya empat keluarga, istri pertama dan anak-anaknya dengan istri-istri lain dan anak-anaknya bukanlah suatu keluarga yang masih-masing terpisah, akan tetapi semuanya merupakan satu kesatuan keluarga besar.

B. Poligami Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Pengertian Poligami

Undang-undang Perkawinan di sini ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Seperti kita ketahui, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini mulai pada tanggal 1 Oktober 1975.³³

Tata tertib dan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang yang disebut Undang-Undang Pokok Perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³³Humaidi Tatapangarsa, *Hakikat Poligami Dalam Islam*, h. 76.

Pada prinsipnya dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut asas monogami seperti terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan, *Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*, namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.³⁴

2. Syarat-Syarat Poligami

Syarat poligami menurut pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternative yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami.³⁵

3. Poligami Menurut UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Sistem perkawinan yang dianut di Indonesia pada prinsipnya ialah monogami. Monogami adalah suatu asas Undang-Undang Perkawinan, dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan boleh beristri lebih dari seorang.

³⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 95.

³⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 96-97.

Dalam pengecualian ini, Undang-Undang memberikan syarat atau pembatas-pembatas yang cukup berat, yaitu berupa pemenuhan dan syarat tertentu serta izin dari pengadilan, seperti yang di syariatkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³⁶

Kemudian pada pasal 4 ayat (1) dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya pada pasal 4 berikutnya ayat (2) menyebutkan pengadilan yang di maksud data ayat (1) dalam pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁷

Dalam pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³⁶Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, h. 4-6.

³⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 163.

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan atau kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁸

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri pertamanya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.³⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 menyebutkan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Kemudian dalam Pasal 41 yang berisikan bahwa Pengadilan akan memeriksa mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk nikah lagi.
- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan lagi di depan sidang Pengadilan.

³⁸ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, h. 90.

³⁹ Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Hadis Saw*, h. 245.

- c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.⁴⁰

Kemudian dalam Pasal 42 ayat (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang terdapat pada Pasal 40 dan 41, maka Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Pada ayat (2) Pemeriksaan Pengadilan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampiran lainnya.

Pasal 43 menyebutkan “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukupnya suatu alasan bagi pemohon untuk ber-isteri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.”⁴¹

Pasal 44 menyebutkan bahwa “Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, sebelum adanya izin dari Pengadilan seperti yang di maksud pada Pasal 43.

Kemudian Pasal 45 ayat (1) kecuali apabila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: (a) barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); (b) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10

⁴⁰Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, h. 7-8.

⁴¹*Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h.53.

ayat (1), 11, 13, 44, Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).⁴²



⁴²*Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 54.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung terdapat objek yang diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian social yang menggunakan format deskripsi kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu.

Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.¹ Peneliti akan berusaha mendeskripsikan, menganalisis serta memaparkan Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU

¹Nurhidayat Muh.Said, *Metode Penelitian Dakwah* (Cet. I; Makassar; Alauddin University Press, 2013), h. 37.

Perkawinan No. 1 tahun 1974) di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik fenomena yang berhasil didapat peneliti, sehingga penelitian ini dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Taeng yaitu pada masyarakat. Adapun alasan pemilihan tempat ini dengan mempertimbangkan hasil dari pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melihat bahwa lokasi penelitian ini sangat cocok dan penulis juga menilai bahwa sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas yakni fenomena poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga (analisis perbandingan antara hukum Islam dan UU perkawinan) di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan juga membantu menyelesaikan rumusan masalah yang diangkat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan dua jenis pendekatan yaitu *Yuridis Normatif* dan *Syari'i*. Pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan seta norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan

Syar'I adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat Al-Qur'an dan hadis NAbi Saw yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. *Sumber Data*

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Karena sifatnya adalah kajian lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis data sebagai berikut:

1. Data primer, adalah data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian atau objek penelitian.² Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan cara interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung lapangan dengan mengadakan wawancara kepada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai fenomena poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga.

Adapun pihak istri dan suami yang diwawancarai untuk membantu mengumpulkan data, yaitu:

No	Istri	Pekerjaan	suami	Pekerjaan
1.	Nunung Nursyahadah	IRT	Halaluddin	Wiraswasta
2.	Erni	wiraswasta	Saru	Wiraswasta
3.	Majadia	IRT	Safri Syam	Buru Harian

²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya* (Cet IX; Kencana: Jakarta, 2005), h. 132.

Adapun pihak masyarakat yang diwawancarai untuk membantu mengumpulkan data, yaitu:

No	Nama	Pekerjaan
1.	M. Yunus S.H	Imam Desa Taeng
2.	Yusuf Mahmud	Wiraswaata
3.	Fatmawati S.Pd	Guru
4.	Syahmini	IRT
5.	Ramlah	Wirausaha
6.	Fitriani	IRT

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang diduga mengetahui masalah yang diteliti serta dari buku-buku, Al-Qur'an dan hadist, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah *field research*, maka data penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara:

1. Wawancara (*interview*), adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Inti dan metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara.

Wawancara ini dilakukan di Desa Taeng, tepatnya di keluarga yang melakukan poligami. Pertemuan antara peneliti dan responden perlu dilakukan

untuk memperoleh data atau keluarga data atau keterangan mengenai fenomena poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga.

2. Pengamatan (*observation*), adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Desa Taeng.³
3. Dokumentasi (*documentation*), adalah pengumpulan data yang telah di dokumentasikan dalam buku-buku dan surat keterangan lainnya.⁴ Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi di Desa Taeng.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah terpilih. Dengan kata lain instrumen penelitian dapat disebut dengan alat ukur.⁵ Adapun alat-alat yang harus dipersiapkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan infoman yang berupa daftar pertanyaan.

³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, h. 129-142.

⁴Kartini Hartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar maju, 1990), h. 157

⁵Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepbulish, 2018), h. 66.

2. Kamera

Kamera adalah alat yang berfungsi untuk mengambil gambar dan merekam segala bentuk kegiatan peneliti selama melakukan pembicaraan dan informan.

F. Teknik Pengolahan dan Data Analisis

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap peroleh data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, dan kemudian ditafsirkan. Data yang telah dikumpulkan perlu diolah dengan beberapa metode. Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁶ Secara garis besar metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Edit (*editing*)

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam buku catatan , daftar pernyataan ataupun pada pedoman wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan dinamakan mengedit data. Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakuratan, dan keseragaman jawaban informan. Sehingga dengan kegiatan ini peneliti dapat memeriksa kembali jawaban dari informasi yang telah diperoleh.

⁶Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Cet.I; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 104.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Hal ini peneliti tunjukkan dengan mengklasifikasikan berbagai jawaban dari responden dan para informan. Sehingga menjadikan pembacaan penelitian lebih mudah karena telah dikelompokkan dalam berbagai kategori. Dengan mereduksi data berarti memilih yang pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Verifikasi (*verifying*)

Mengecek kembali kebenaran data yang kita peroleh pada pihak lain agar hasil yang lebih terjamin validitasnya. Seperti konfirmasi pada pihak lain yang dapat memberikan data yaitu tetangga dekat. Karena informasi tersebut dapat membantu memberikan keterangan yang obyektif.

4. Analisis (*analyzing*)

Analisis yaitu mengelompokkan, membuat suatu urutan serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam hal ini analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷

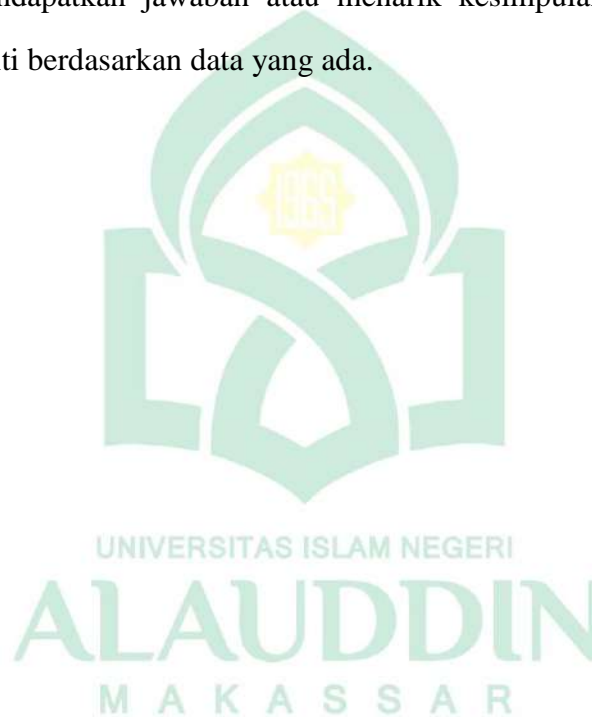
Dalam melakukan analisis ini, peneliti berusaha menggambarkan kehidupan keluarga poligami, sehingga nantinya dapat diperoleh sebuah

⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 49

gambaran yang jelas. Dengan demikian, maka dalam peneliti ini data yang diperoleh di lapangan, baik yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi, digambarkan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah pengambilan data dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban atau menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan data yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

a. Sejarah Desa Taeng

Pada awalnya Desa Taeng merupakan sebuah dusun dalam wilayah Desa Bontoala yang terletak di sebelah utara berbatasan dengan sungai Je'neberang. Pada saat itu Desa Bontoala adalah sebuah desa yang cukup luas, walaupun telah mengalami beberapa pemekaran. Dusun Taeng pada saat itu merupakan pusat pemerinthan desa karena kantor desa berada di dusun Taeng.

Namun setelah kepemimpinan Abd. Rahim Alauddin Kr. Kulle berakhir dan dilanjutkan oleh Sangkala Dg. Ngawing sebagai Kepala Desa terpilih pada saat itu, maka pusat pemerintahan desa Bontoala berpindah ke Bontomajannang, dengan membangun kantor desa baru. Setelah kepemimpinan Sangkala Dg. Ngawing berjalan beberapa tahun muncullah gagasan dari para tokoh pemuda dan tokoh masyarakat untuk membentuk desa tersendiri.

Setelah melalui beberapa proses maka pada tahun 1999 berdirilah sebuah desa baru dari hasil pemekaran Desa Bontoala dan disepakatilah Taeng sebagai nama desa baru tersebut. Sebagai Kepala Desa Persiapan yang baru maka ditunjuklah AR. Yasin Alauddin Kr. Ngaseng sebagai Kepala Desa Persiapan Taeng, dan hanya berjalan ± 1 tahun, disebabkan beliau wafat pada tahun 2000. Sebagai pelaksana tugas dalam kekosongan pada saat itu, maka Sekretaris Desa mengambil alih segala tugas-tugas kepala desa sampai tahun 2001.

Berdasarkan hasil musyawarah LKMD Desa Bontoala, maka disepakatilah Nurdin Yasin sebagai Kepala Desa Persiapan Taeng pada tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2007 Desa Persiapan Taeng menjadi desa Defenitif dan sekaligus pemilihan Kepala Desa I dan Nurdin Yasin Dg. Nyikko sebagai kepala Desa Taeng.

b. Letak Desa

Desa Taeng adalah salah satu desa di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota Kecamatan ± 3 km dengan waktu tempuh 5 menit dan dari ibukota kabupaten 4 km dengan waktu tempuh 7 menit. Batas-batas wilayah pemerintahan Desa Taeng Kecamatan Pallangga sebagai berikut :

- 1) Utara : Sungai Je'neberang
- 2) Selatan : Desa Kanjilo Kec. Barombong
- 3) Barat : Desa Tamannyeleng Kec. Barombong
- 4) Timur : Desa Bontoala

c. Administrasi Desa

Secara administrasi Desa Taeng terdiri dari 2 Dusun, yakni Dusun Taeng dan Dusun Gantarang. Untuk Dusun Taeng terdiri dari 8 RW dan 20 RT sedangkan dan Dusun Gantarang terdiri dari 7 RW dan 18 RT.

d. Topografi Desa

Dilihat dari topografinya dan kontur tanah, Desa Taeng secara umum berupa daerah datar yang berada pada ketinggian ± 4 m di atas permukaan laut (sebagai areal pemukiman, persawahan, perkebunan), dengan luas wilayah 2,27 Km². Sedangkan letak koordinat Desa Taeng 5° 11' 46,52" LS 119° 26' 02.09" BT, dengan kemiringan 2–5 °.

e. Luas dan Pemanfaatan Lahan Desa

Luas wilayah desa Taeng adalah 227 Ha, dimanfaatkan untuk :

1. Nonpertanian

Lahan non pertanian yang dimaksud sudah tercakup di dalamnya untuk perumahan, industri, perkantoran, jalan, prasarana umum, lapangan, lahan hijau dengan luas keseluruhan 157,91 Ha

2. Persawahan

Wilayah persawahan yang ada di desa Taeng setiap tahun semakin berkurang disebabkan adanya alih fungsi lahan menjadi pengembangan perumahan. Sehingga luas sawah yang masih ada sekarang sekitar 64,69 Ha, terdiri atas :

- a) Sawah tadah hujan : 34.20 Ha
- b) Sawah beririgasi teknis : 30.49 Ha
- c) Lahan pertanian non sawah : 4.40 Ha

Pengalihan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman selama setahun terakhir sekitar 0,36% .

3. Sungai

Desa Taeng termasuk desa yang dialiri oleh Sungai Je'neberang dengan panjang 2,3 km dan luas 0,75 km² yang dimanfaatkan oleh warga desa Taeng sebagai transportasi sungai.

4. Irigasi

Irigasi yang ada di desa panjangnya hanya 238 m yang hanya mampu mengairi persawahan yang ada di Jingaraka saja. Ini semua diakibatkan karena irigasi yang telah dibangun sudah tertimbun akibat pengembangan perumahan.

NO	PENGUNAAN	LUAS
1	Tanah Sawah	34,2
2	Tanah Kering	157,91
3	Tanah Basah	4, 40
4	Fasilitas Umum	0,65

2. Perekonomian Desa Taeng

Secara umum sumber perekonomian ataupun mata pencaharian penduduk dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Mata Pencaharian Desa Taeng

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH			(%)
		L	P	JUMLAH	
1	Petani	45	0	45	0,49
2	Pelajar/Mahasiswa	1.689	1.736	3.425	37,48
3	Pegawai Swasta	398	127	525	5,75
4	Pedagang	170	302	472	5,17
5	Pegawai Negeri Sipil	189	55	244	2,67
6	TNI/Polri	134	1	135	1,48
7	Buruh Swasta	880	69	949	10,39
8	Pengrajin	3	5	8	0,09
9	Penjahit	6	9	15	0,16
10	Tukang Kayu	47	0	47	0,51
11	Dokter	0	2	2	0,02
12	Sopir / Pengemudi	45	0	45	0,49

13	Pengusaha	19	8	27	0,30
14	Pegawai BUMN	22	9	31	0,34
15	Mengurus Rumah Tangga	0	926	926	10,13
16	Belum / Tidak Bekerja	861	1.380	2.241	24,53
	JUMLAH	4.508	4.629	9.137	100

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Taeng jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 27,86 %. Dari jumlah tersebut kehidupannya bergantung sebagai buruh harian, ada sekitar 10,39 % dari total jumlah penduduk

Sumber-sumber perekonomian Desa Taeng, terbagi dalam beberapa sektor:

a. Sektor Pertanian

Luas lahan pertanian Desa Taeng adalah 64.69 Ha yang dikelola oleh 3.2% oleh para petani, hal ini disebabkan karena :

- 1) Adanya beberapa lahan pertanian yang semakin tergeser dengan adanya pengembangan lokasi perumahan sehingga beberapa petani beralih profesi.
- 2) Area pertanian yang beririgasi hanya 13.43 % dengan produksi 4 ton/Ha dengan dua kali musim tanam. Sedangkan sawah tadah hujan 34.20 Ha dengan hasil sekali panen sekitar 4 ton/Ha.
- 3) Selain masalah tersebut di atas penerapan teknologi dikalangan petani masih kurang sehingga ikut mempengaruhi produktifitas hasil pertanian.

b. Sektor Peternakan

Peternak yang ada di desa Taeng terdiri atas :

- 1) Peternak Ikan Nila, kegiatan ini memanfaatkan Sungai Je'neberang di mana banyak masyarakat beternak ikan nila

- 2) Sementara warga yang memelihara ternak seperti ayam buras, kambing dan lainnya hanya sebatas pekerjaan sampingan saja dan belum diandalkan untuk peningkatan pendapatan. Namun apabila mau dikelola dengan baik sangat menjanjikan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

c. Sektor Kerajinan

Di desa Taeng terdapat beberapa usaha kerajinan seperti usaha meubel, pertenunan sarung sutera, dimana memproduksi hanya sebatas pesanan saja. Sementara apabila dikelola secara baik, maka akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang baru.

d. Sektor Jasa (tukang batu, tukang kayu, bengkel, ojek, tukang becak)

- a) Pekerjaan buruh harian merupakan alternatif termudah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.
- b) Pekerjaan buruh harian merupakan pekerjaan turun temurun.

e. Sektor Perdagangan

Dengan bertambahnya jumlah penduduk di desa Taeng tiap tahunnya secara signifikan dikarenakan perkembangan perumahan yang banyak, menyebabkan masyarakat banyak yang bergerak di sektor perdagangan, baik grosiran maupun warung campuran.

Tabel 1.2 Usia Produktif

NO	TENAGA KERJA	JUMLAH		TOTAL JUMLAH
		L	P	
1	Penduduk Usia Produktif	1.958	587	2.545
2	Ibu Rumah Tangga	0	926	926
3	Penduduk Masih Sekolah	1.689	1.736	3.425

4	Penduduk non Produksi	861	1.380	2.241
	JUMLAH	4.508	4.629	9.137

3. Keadaan Statistik Sosial Budaya

a. Jumlah Penduduk

Desa Taeng mempunyai Jumlah Penduduk 9.137 Jiwa, dengan KK 2.086 yang tersebar dalam 2 wilayah dusun yakni Dusun Taeng dan Dusun Gantarang. Di mana jumlah penduduk laki-laki sebesar 4.508 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 4.629 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat seperti 51 tabel berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Dusun	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Taeng	2.467	2.487	4.954
Gantarang	2.041	2.142	4.183
JUMLAH	4.508	4.629	9.137

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki atau ada sekitar 50.66 % dari total penduduk.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

NO	KELOMPOK USIA	L	P	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	0 - 5 tahun	391	438	829	9,07
2	6 - 9 tahun	488	514	1.002	10,97

3	10 - 15 tahun	563	539	1.102	12,06
4	16 - 19 tahun	442	415	857	9,38
5	20 - 24 tahun	357	362	719	7,87
6	25 - 29 tahun	256	267	523	5,72
7	30 - 34 tahun	158	185	343	3,75
8	35 - 39 tahun	425	454	879	9,62
9	40 - 44 tahun	548	587	1.135	12,42
10	45 - 49 tahun	360	368	728	7,97
11	50 - 54 tahun	144	156	300	3,28
12	55 - 59 tahun	110	128	238	2,60
13	60 - 64 tahun	144	156	300	3,28
14	> 65	86	96	182	1,99
	JUMLAH	4.197	4.255	9.137	100

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 1.5 Tabel Agama Di Desa Taeng

No	A G A M A	J U M L A H			PERSENTASE (%)
		L	P	Jml	
1	Islam	4.150	4.191	8.424	92,20
2	Kristen Katolik	5	8	13	0,14
3	Kristen Protestan	36	49	85	0,93
4	Budha	2	2	4	0,04
5	Hindu	4	5	9	0,10
6	Atheis	0	0	0	0,00
	JUMLAH	4.197	4.255	9.137	100

Sebelum pengembangan perumahan di Desa Taeng, agama yang dianut oleh warga desa Taeng 100% beragama Islam, namun karena pembangunan perumahan tiap tahun bertambah menyebabkan banyak warga dari luar yang beragama lain menetap dan menjadi bagian penduduk desa Taeng. Dari table di atas penduduk yang beragama Islam sebesar 92,20 % , yang beragama Kristen sebesar 1,07 %, yang beragama Budha sebesar 0.04 % dan Hindu sebesar 0.01 %. Walaupun agama Islam yang mayoritas di Desa Taeng, namun sangat menghormati agama yang lain.

d. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

No	Kelompok KK	Jumlah	Persentasi (%)
1	KK Prasejahtera	544	12,91
2	KK Sejahtera I	488	11,58
3	KK Sejahtera II	1.775	42,13
4	KK Sejahtera III	1.108	26,30
5	KK Sejahtera III +	216	5,13
Jumlah		4.213	

Dari table di atas jumlah KK yang masuk dalam kategori KK Prasejahtera sebesar 12.91% dan diharapkan akan berkurang tiap tahunnya. Dengan Usaha Ekonomi Produktif yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa Taeng memungkinkan untuk mengurangi jumlah KK Prasejahtera yang ada.

f. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya.

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Di bawah ini table yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Taeng.

Tabel 1.7 Tingkat pendidikan

No	Uraian	Jumlah		Prosentasi (%)
		L	P	
1	Belum Sekolah	710	721	15,66
2	Tidak/belum tamat SD	901	853	19,20
3	Tamat SD	789	744	16,78
4	Tamat SLTP	764	811	17,24
5	Tamat SLTA	815	880	18,55
6	Sarjana Muda (D3)	251	315	6,19
7	Sarjana (S1)	234	256	5,36
8	Pasca Sarjana (S2)	37	52	0,98
9	Pasca (S3) dll	3	1	0,04
Jumlah		4.504	4.633	100

4. Deskripsi dan Statistik Prasarana dan Sarana Desa

Dari seluruh sarana dan prasarana yang ada di desa Taeng terdiri atas :

- a. Sarana Jalan

Tabel 1.8 Sarana Jalan Desa Taeng

NO	Jenis Jalan	Lokasi	Volume (m)	KET
1	Jalan Kabupaten	Kaledupaya, Taeng, Campagaya, Bontojalling, Gantarang	2.030	Baik
2	Jalan Desa	Bontojalling, Ana'gowa	1.517	Baik
3	Jalan Lingkungan	Dusun I dan Dusun II	5.433,5	Sebagian rusak
4	Jalan Setapak /tanah	Dusun I dan Dusun II	2.687	Masih ada jalan tanah
5	Jembatan	Jingaraka	11.667.5	Baik

Sarana jalan yang ada di desa Taeng meliputi jalan Kabupaten yang mana bisa terhubung ke kota Makassar dan Kabupaten Takalar, kondisi jalan ini sudah mulai berlubang di beberapa titik lokasi. Sedangkan kondisi jalan desa yang ada sudah mulai rusak berat, ini disebabkan karena jalan ini sudah lama dan dilewati truk-truk yang mengangkut bahan bangunan akibat pembangunan perumahan yang ada di desa Taeng.

Untuk jalan lingkungan dan jalan setapak yang ada sebagian sudah pengerasan ataupun dipaving blok, namun begitu masih ada yang berupa jalan tanah, dan diharapkan untuk tahun-tahun ke depan semua jalan lingkungan ataupun jalan setapak sudah diaspal ataupun dipaving blok.

Jembatan yang ada di desa Taeng (Jingaraka) yang menghubungkan dengan desa tetangga (Desa Kanjilo) kondisinya baik, jembatan ini dipergunakan oleh warga untuk beraktifitas karena menghubungkan akses jalan yang dekat menuju kota kabupaten ataupun kota Makassar untuk menjual hasil panen maupun sayur mayur. Begitu juga dengan anak-anak sekolah yang mana lebih dekat dengan melewati

jembatan ini untuk menuju ke sekolah yang ada di desa tetangga ataupun sekolah yang ada di Kecamatan.

b. Sarana Ibadah

Sarana Ibadah yang ada di desa Taeng berjumlah 11 buah dan 1 Mushallah yang dipergunakan oleh masyarakat untuk beribadah. Untuk kelanjutan pembangunan sarana ibadah ini masyarakat berswadaya, namun begitu masih ada beberapa Masjid yang memerlukan penanganan bantuan.

Jumlah sarana Ibadah di dua dusun yakni pada dusun Taeng mempunyai 6 Mesjid, 1 Mushallah dan dusun Gantarang mempunyai 6 masjid. Lengkapnya seperti table berikut.

Tabel 1.9 Sarana Ibadah

NO	PRASARANA	JUMLAH	KET
1	Mesjid	12	
2	Mushallah	1	
3	Gereja	0	
4	Vihara	0	

c. Sarana Pendidikan

Tabel 1.10 Sarana Pendidikan

NO.	SEKOLAH	Jumlah		
		Bangunan Fisik	Murid	Guru
1	TK	3	315	9
2	SD	4	1754	

Sarana pendidikan yang ada di desa Taeng sekarang hanya terdiri dari tingkatan TK dan SD saja, dulu pernah ada sekolah lanjutan pertama yakni SMP Islam Istiqlal namun oleh pengelola sekolah ini ditutup pada tahun 2007.

Untuk TK yang ada sekarang masih banyak memerlukan bantuan, baik untuk penambahan ruangan belajar (kelas) maupun sarana bermain bagi muridnya, dan untuk PAUD sampai saat ini belum mempunyai gedung sendiri dan hanya meminjam gedung bekas SMP Islam Istiqlal.

Pada halaman sekolah dasar yang ada (SDI Bontoala I, II, SDN Taeng, SDN Belaka) pada musim hujan tergenang air, becek dan pada musim kemarau berdebu sehingga mengganggu aktifitas proses belajar mengajar.

Untuk sarana yang ada masih jauh dari yang diharapkan, seperti sarana komputer, yang mana diharapkan dengan sarana ini siswa ataupun guru akan lebih mudah mengakses dunia internet.

d. Sarana Kesehatan

Tabel 2.1 Sarana Kesehatan

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Poskesdes	1	Aktif
2	Posyandu	4	Aktif, tidak mempunyai gedung
3	Pondok Bersalin	1	Aktif
4	Dokter Praktek (Umum)	1	Aktif

Penanganan kesehatan warga, masih menggunakan Poskesdes jika penanganannya tidak terlalu parah misalnya demam, batuk-batuk, sedangkan jika memerlukan penanganan yang lebih serius warga biasanya berobat ke rumah sakit yang ada di kabupaten ataupun ke kota Makassar.

Untuk penanganan kesehatan ibu dan anak, posyandu sangat berperan aktif. Baik untuk penimbangan balita, pemberian vitamin maupun penyuluhan kesehatan.

Kegiatan ini dilakukan oleh para kader posyandu dan di bantu tenaga kesehatan dari kecamatan.

Warga juga memanfaatkan pondok bersalin yang ada di Taeng, baik untuk pemeriksaan kehamilan maupun dalam proses melahirkan.

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Jumlah Pos / Klinik KB		
2	Jumlah PUS	1484	
3	Jumlah PUS masuk KB	742	
4	Jumlah Akseptor KB		
	a. PIL	520	
	b. IUD	0	
	c. KONDOM	0	
	d. SUNTIK	222	
	e. MOP	0	
	f. MOW	0	
	g. KB. MANDIRI	0	

e. Sarana Olahraga

Tabel 2.2 Sarana Olahraga

No	Lokasi	Jumlah	KET
1	Lapangan Sepak Bola	1	
2	Lapangan Bulutangkis	2	
3	Tennis Meja	2	

Sarana olahraga yang sering dimanfaatkan oleh warga adalah lapangan sepak bola, namun kondisi dari lapangan tersebut masih jauh dari harapan, di mana pada saat musim hujan tergenang dan becek, demikian juga dengan prasarannya seperti WC ataupun ruang ganti tidak ada. Padahal kalau dikelola dengan baik bisa dijadikan

sebagai sumber pendapatan desa dengan menyewakan kepada pengelola sekolah sepak bola yang mana sangat kesulitan mendapatkan lapangan.

Untuk sarana bulutangkis hanya dipergunakan pada saat musim hujan saja, ini disebabkan karena lapangan yang ada adalah lapangan terbuka.

5. Deskripsi dan Statistik Pemerintahan Umum

a. Pemerintahan Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai fungsi :

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- 3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 4) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- 5) Membina Perekonomian Desa.
- 6) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Table 2.3 Struktur Pemerintahan

No.	Nama	Jabatan
1	H. Nurdin Yasin	Kepala Desa
2	Muh. Kasim, SH	Sekretaris Desa
3	M. Putra Aditama	Kaur Umum
4	Nurseha, SE	Kasi Pemerintah

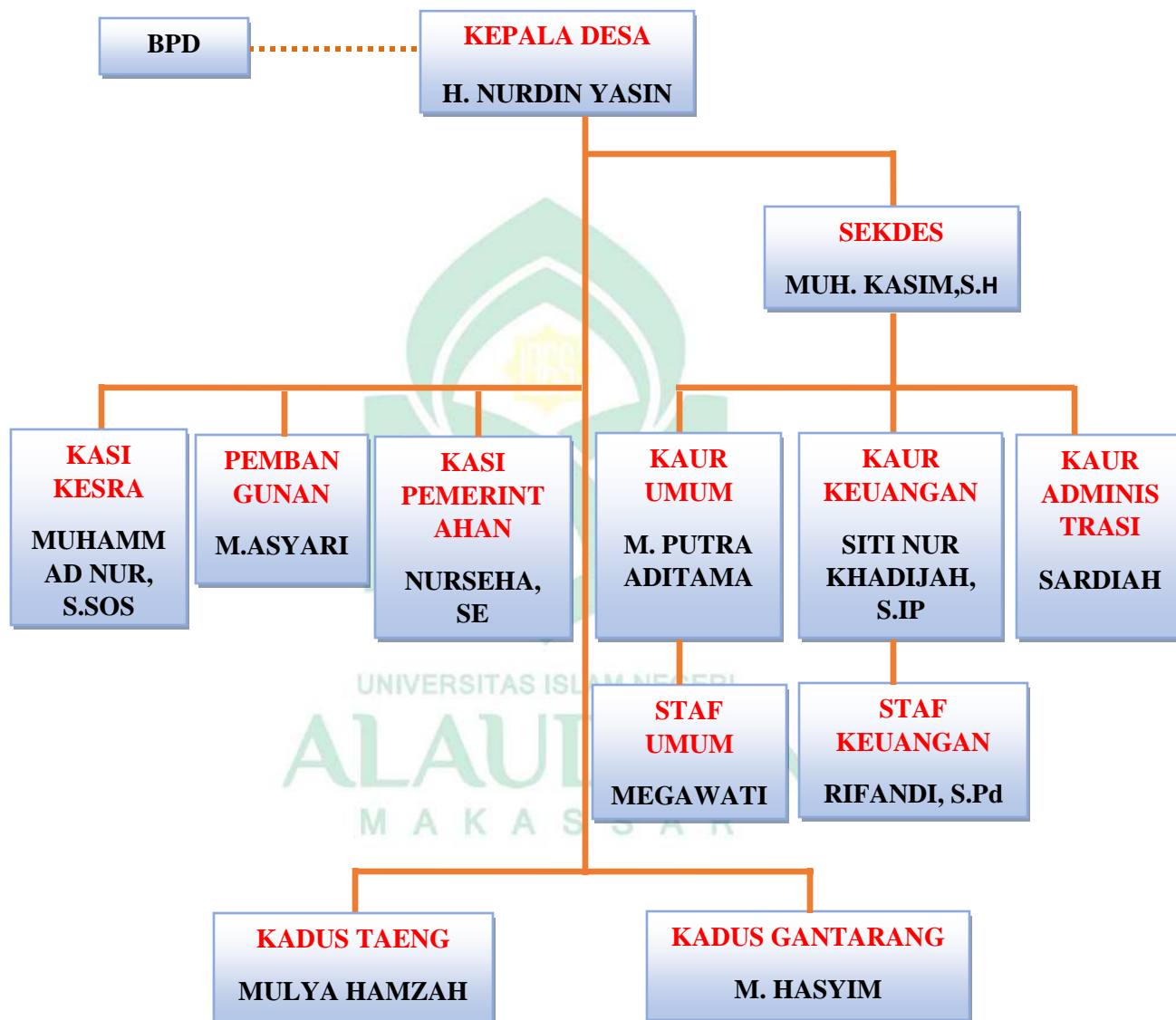
5	Muhammad Nur, S.Sos	Kasi Kesra
6	Siti Nur Khadijah, S. IP	Kaur Keuangan
7	Sardiah	Kaur Administrasi
8	Muh. Asyari	Kasi Pembangunan
9	Rifandi, S.Pd	Staf Keuangan
10	Megawati	Staf Administrasi
11	Mulya Hamzah	Kadus Taeng
12	M. Hasjim	Kadus Gantarang

Pusat Pemerintahan Desa Taeng bertempat di Dusun Taeng, dan telah memiliki gedung antor dan aula pertemuan. Namun lahan yang dipakai statusnya masih hak pakai, sehingga untuk merenovasi bangunan kantor terkendala dalam hal status tanah yang ditempati. Di kantor Desa Taeng telah dilengkapi dengan mobile berupa meja, kursi, lemari, papan potensi dan computer.

Pelayanan ke Masyarakat dilaksanakan setiap hari jam kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari. Namun masih perlu peningkatan kapasitas SDM. Peningkatan kapasitas yang dimaksud adalah menyangkut tugas dan fungsinya masing-masing antara lain: keterampilan administrasi, pengoperasian computer dan teknik pelayanan tugas.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja

**PEMERINTAH DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA**



b. Kelembagaan Umum

Kelembagaan masyarakat yang ada di desa Taeng merupakan mitra pemerintah desa dan sangat memegang peranan penting dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, oleh karena itu **“Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola”** maupun **“Penguatan Kapasitas Lembaga”** perlu menjadi agenda Pembangunan Desa.

Lembaga-lembaga yang dimaksud seperti pada table berikut:

Tabel 1.14 Jumlah dan Jenis Kelembagaan di Desa Taeng

No	Jenis Kelembagaan	Jumlah	Keterangan
1	BPD	1	Aktif
2	LKMD	1	Aktif
3	PKK	1	Aktif
4	Majelis Taklim	3	Aktif
5	Kelompok Tani	1	Aktif
6	Karang Taruna	1	Aktif
7	SPAS	1	Aktif
8	Simpan Pinjam Perempuan	2	Aktif
9	Sinoman	2	Aktif
10	Sanggar Seni	2	Aktif
11	Seni Pencak Silat	1	Aktif

Sumber data : Data MMDD¹

¹Sumber data : Data MMDD Desa Taeng

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. mengingat tugas, kedudukan, fungsinya, BPD memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih, efektif, terarah sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD Desa Taeng yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja organisasi tersebut secara umum dinilai belum optimal, namun terlepas dari penilaian masyarakat tersebut ternyata masih ditemukan sejumlah fakta yang apabila dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja organisasi menunjukkan bahwa ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dalam struktur keanggotaan BPD Desa Taeng yaitu masih adanya sejumlah elemen Masyarakat yang belum terwakili dalam struktur keanggotaan lembaga tersebut. Misalnya tidak adanya keterwakilan perempuan dalam struktur keanggotaan BPD Desa Taeng.

Faktor yang dinilai sebagai hambatan dominan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yaitu :

- a) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh anggota BPD perihal pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b) Ketiadaan ruang privasi (kantor) bagi para anggota BPD dan masih minimnya honor yang diterimanya.

Dan upaya-upaya yang diharapkan ke depan antara lain :

- a) Perlunya mengintensifkan bentuk bentuk pembinaan dan pemberian keterampilan-keterampilan teknis kepada para anggota BPD.
- b) Mengupayakan kaderisasi calon-calon anggota BPD yang dinilai kapabel dan sedapat mungkin mewakili seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya sekedar mengandalkan faktor ketokohan semata.
- c) Pengadaan sarana dan prasarana serta perumusan kebijakan guna meningkatkan jumlah kompensasi atau honor maupun anggaran khusus untuk melaksanakan fungsi yang diterima oleh BPD.

2. SPAS

Untuk SPAS, kelembagaan yang dibentuk ini adalah merupakan program Pemerintah Kabupaten Gowa, namun sangat disayangkan karena sarana yang ada sekarang tidak memuat lagi murid yang ada, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya meminjam Aula Pertemuan Kantor Desa.

3. Taman Kanak-Kanak / Taman Pendidikan Al Quran (TK/TPA)

TK/TPA di desa Taeng berjumlah 2 (unit) dan mempunyai pengurus yang lengkap, dan telah memberikan sumbangsih bagi anak-anak dan remaja yang bebas buta baca Al Quran. Di samping TK/TPA di desa Taeng juga mempunyai guru ngaji tradisional yang berjumlah 10 unit yang tersebar di dusun Taeng dan dusun Gantarang.

B. Penyebab Terjadinya Poligami di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa

Akhir-akhir ini di Desa Taeng masalah perkawinan poligami topik dan bahan pembicaraan masyarakat yang tidak ada habisnya. Memang perkawinan poligami tidak di larang dan tidak pula di perintahkan, hanya saja diperbolehkan bagi orang-

orang tertentu saja yang bisa memenuhi persyaratan untuk poligami. Dengan kata lain poligami hanyalah pintu kecil yang hanya dapat di lalui oleh orang-orang yang menginginkannya ketika mengalami suatu masalah atau dalam keadaan darurat saja.

Biasanya orang yang ingin berpoligami sering mengambil keputusan yaitu dengan adanya suatu permasalahan (mempunyai masalah) dalam hubungan perkawinan mereka. Seharmonis apa pun, pasti ada sebab yang membuat dirinya mengambil keputusan untuk berpoligami. Baik disebabkan oleh karena suami maupun karena istri. Tetapi dalam penelitian ini berdasarkan pengamatan (observasi) ataupun wawancara penulis dengan responden tidak semua perkawinan poligami dilakukan berdasarkan sesuatu hal yang dapat dikategorikan bolehnya melakukan poligami, karena itulah perkawinan poligami tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan istri pertama dan anaknya.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan poligami di Desa Taeng diantaranya yaitu:

1. Jarak jauh antara suami dan isteri

Salah satu alasan suami untuk menikah lagi karena jarak jauh, kehidupan suami menjadi tidak menentu dan sangat mengharapkan kehadiran seorang pendamping yang dapat memperhatikan dirinya. Oleh karena itu kondisi sanagat memungkinkan seorang suami untuk melakukan perselingkuhan yang akhirnya menikah walaupun tanpa sepengetahuan sang istri. Hal ini di alami oleh bapak Halaluddin.

Alasan bapak Halaluddin melakukan perkawinan poligami merasa jauh dari istrinya mempengaruhi keinginan bapak Halaluddin untuk mencari wanita lain.

Perkawinan kedua ini dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama. Perkawinan poligami tersebut mengakibatkan: tuntutan biaya hidup yang besar, ketidakharmonisan hubungan istri dan anak-anaknya.²

Pada kasus ini, poligami dimaknai pula sebagai sebuah perwujudan dorongan seks. Walau perasaan terpaksa yang dirasakan oleh istri dan anaknya dalam menerima kondisi tersebut tapi tetap dijalankannya dalam memenuhi kebutuhan hidup khususnya dalam pemeliharaan, pendidikan anak dan perlindungan. Namun (waktu, tenaga dan materi) demikian bagi istri dan anak menganggap poligami hanya membawa beban psikis dalam keluarga. Sebagai istri tetap mendambakan perkawinan yang tunggal.

Dalam hal pemberian fungsi keluarga, tugas sebagai seorang suami tetap dijalankan sebagaimana biasa kecuali fungsi sebagai seorang ayah dalam memberikan perlindungan dan penyaluran kasih sayang berkurang karena waktu yang. Begitu pun juga dengan fungsi pendidikan dan pemeliharaan lebih banyak diambil alih oleh istri. Sedangkan fungsi ekonomi tetap menjadi tanggung jawab.

2. Menurutkan nafsu semata

Nafsu merupakan pendorong yang sangat kuat terjadi kasus poligami, karena nafsu memang kebutuhan biologis yang diciptakan oleh Allah bagi setiap makhluknya. Belum lagi bagi mereka yang memiliki kelainan seks seperti hiperseks, maka tidaklah cukup hanya satu istri saja.

Dalam kasus pak Safri adalah kasus yang agak unik karena telah kawin sebanyak tiga kali. Perkawinan poligaminya ini dilakukan tanpa sepengetahuan istri-

²Halaluddin (44 tahun), Wiraswasta, Wawancara, Gowa 27 Mei 2019.

istrinya. Keadaan poligami ini menimbulkan: ketidakharmonisan dalam keluarga dan Perlakuan tidak adil terhadap istrinya.³

Nafsu biologis laki-laki sangat besar, yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh satu orang istri saja, atau istrinya sendiri memang sedang tidak ingin memenuhi kebutuhan biologisnya., agar tidak terjadi penyimpangan dan terjerumus ke dalam perbuatan zina, saat itulah poligami menjadi pengganti. Atau apabila istri memang sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis suami.

Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan fungsi keluarga yang terganggu seperti ekonomi, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan. Sedangkan fungsi suami masih tetap ingin dijalankan tetapi mendapat hambatan dari istri. Hampir seluruh fungsi dilakukan oleh istri.

3. Kesempatan

Kesempatan merupakan satu hal menjadi penyebab terjadinya poligami. Adanya kesempatan inilah yang dapat memberi peluang bagi suami untuk cenderung menikah walaupun tanpa ada restu dari istri pertama. Kesempatan ini dapat terjadi kapan saja maakalah kondisi memungkinkan hal tersebut terjadi seperti yang dilakukan oleh bapak Saru yang menanggapi bahwa keadaan itu muncul dikala ada peluang seperti istri yang pada saat itu istri yang pada saat itu tidak memperhatikannya disaat ia bertemu dengan wanita lain. Keadaan itu terus menerus terjadi tanpa sepengetahuan dari istri pertama. Tindakan inilah yang mendorong dirinya untuk menikah secara diam-diam.

Dalam kasus poligami bapak Saru ini jarang memperhatikan dengan istrinya yang mengakibatkan bapak Saru secara pergi secara diam-diam menemui wanita

³Safri Syam (38 tahun), Buruh Harian, *Wawancara*, Gowa 28 Mei 2019.

tersebut. Akibat ada kesempatan bagi bapak Saru dengan cara berbohong terhadap istrinya sehingga membuka jalan bagi bapak Saru untuk berpoligami. Dalam kasus ini, bapak Saru sama sekali tidak memberitahu istrinya bahwa dia menikah lagi. Masalah yang dihadapi dalam kasus ini adalah: ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan muncul perasaan cemburu istri.⁴

Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan bahwa makna poligami merupakan perkawinan yang mudah menimbulkan konflik dalam keluarga karena pengaruh rasa cemburu dan jalinan komunikasi antara istri yang kurang harmonis.

Dari jawaban pelaku poligami, ada banyak aspek yang menjadi sebab mereka berpoligami, dalam hal ini alasan berpoligami tidak lagi didasarkan pada hal-hal yang sesuai dengan historikal sebab poligami pada masa sebelumnya Islam dan sesudah Islam. Menurut istri yang dipoligami, alasan ini yang cukup sering terjadi pada pola poligami saat ini, dimana poligami yang dilakukan karena terjadi perselingkuhan antara suami dengan wanita lain yang disebabkan kebersamaan mereka dalam lingkungan kerja dan lain halnya.

Dalam hal ini, poligami dilangsungkan karena keterpaksaan, ada wanita yang mau di madu disebabkan karena keluarga yang mengalami kesulitan akibat ketiadaan pekerjaan. Sehingga dengan menjadi “madu”, wanita tersebut dapat memberi nafkah dan makan bagi keluarganya.

⁴Saru (49 tahun), Wiraswasta, Wawancara, Gowa 28 Mei 1997.

C. Dampak yang di Timbulkan dari Adanya Poligami Tanpa Izin Istri terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa

Menurut Syari'at Islam, perkawinan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan kewajiban suami dan isteri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik di mata masyarakat ataupun di mata Allah Swt. Terdapat satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan oleh umat Islam itu sendiri, yakni bentuk perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami.

Perkawinan poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat kaum perempuan, karena selain hak-hak perempuan itu terabaikan dan juga tidak ada perempuan yang bersedia untuk dimadu atau diduakan. Jika ada perempuan yang bersedia dipoligamikan atau diduakan, maka sebenarnya perempuan itu berada dalam tekanan keterpaksaan.

Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sangat memprihatinkan, karena perkawinan poligami itu dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan isteri pertamanya terlebih dahulu, dan juga dilakukan dengan alasan diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga implikasi perkawinan poligami itu secara psikologis isteri akan merasa sakit hati. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perkawinan poligami yang terjadi di Desa Taeng banyak menimbulkan dampak negatif dari pada manfaatnya.

Berikut adalah pandangan masyarakat terhadap poligami yang terjadi di Desa Taeng:

Hasil wawancara dengan bapak M. Yunus S.H, umur 42 tahun, Imam Desa mengatakan bahwa:

Sebagian besar yang melakukan poligami di Desa ini merupakan poligami yang sifatnya tidak resmi, artinya tidak melakukan prosedur bahkan mereka melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi. Saya tidak setuju dengan adanya poligami karena kenapa, ketika poligami itu terjadi yang muncul itu adalah kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga bahkan tidak ada. Terkait perempuan yang di poligami saya sangat tidak setuju, karena terjadinya perubahan di dalam kehidupan rumah tangganya baik dari segi ekonomi maupun psikologis. Saran saya terhadap pelaku poligami di Desa ini kalau harus terpaksa poligami artinya dia harus melakukan pertimbangan-pertimbangan kalau memang hanya berkeinginan yang di dasari hawa nafsu saja, maka janganlah melakukan poligami.⁵

Hasil wawancara dengan bapak Yusuf Mahmud, umur 56 tahun, Wiraswasta, mengatakan bahwa :

Poligami di Desa ini melalui perkawinan tersembunyi tidak melakukan prosedur-prosedur, para suami yang berpoligami ini menganggap enteng bisa menafkahi istrinya yang pertama dan yang ke dua. Dan sering terjadi perselisihan antara suami dan istri pertama, jika suami yang ingin berpoligami haruslah berlaku adil terhadap semua istri-istrinya jangan ada yang dibedakan.⁶

Hasil wawancara dengan ibu Fitriani, umur 36 tahun, Ibu Rumah Tangga, mengatakan bahwa:

Poligami sah-sah saja jika berbuat adil menikah lebih dari satu, hak dan kewajiban harus seimbang antara istri yang satu dan istri yang lainnya. Sebelum suami yang ingin melakukan poligami harus memikirkan terlebih dahulu dan mempertimbangkan manfaat terlebih dahulu, namun poligami yang saya liat di Desa ini belum cukup adil terhadap istri dan anak-anaknya.⁷

Wawancara bersama ibu Fatmawati S.Pd, umur 26 tahun, Guru, mengatakan bahwa:

Saya sangat setuju dengan adanya poligami, selama ada alasan yang sesuai dalam melakukan poligami seperti istri tidak mempunyai keturunan dan istri mempunyai penyakit yang tidak dapat di sembuhkan. Tetapi jika alasan tidak sesuai dengan hal itu saya tidak setuju dengan adanya poligami tersebut. Karena berdampak terhadap istri dan anak-anaknya seperti, tidak adanya keharmonisan dan kurangnya kasih sayang terhadap anak-anaknya. Saya

⁵M. Yunus (42 tahun), Imam Desa, *Wawancara*, Gowa 14 Juli 2019.

⁶Yusuf Mahmud, (56 tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Gowa 14 Juli 2019.

⁷Fitriani (36 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 14 Juli 2019.

sangat kasihan terhadap istri yang dipoligami karena mengapa dia sangat malu terhadap tetangga dan keluarganya. Saran saya terhadap pelaku poligami berfikirilah beribu-ribu kali untuk melakukan hal tersebut.⁸

Wawancara bersama Ibu Ramlah, umur 42 tahun, Wirausaha, mengatakan bahwa:

Poligami yang terjadi di Desa ini jika dilihat dengan situasinya saya tidak setuju, karena mengapa poligami yang terjadi di Desa ini hanya nafsu semata. Dan poligami di Desa tidak dengan prosedur mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan istri pertamanya. Saya merasa kasian terhadap perempuan yang di poligami karena tidak adanya lagi keharmonisan di dalam rumah tangganya.⁹

Wawancara bersama Ibu Syahmini, umur 48 tahun, Ibu Rumah Tangga mengatakan bahwa:

Saya setuju dengan adanya poligami, apabila tidak mempunyai keturunan dari istri pertama dan dapat berbuat adil terhadap istri dan anak-anaknya, tetapi jika sudah mempunyai keturunan dan tidak mampu berbuat adil tepat saja saya tidak setuju dengan ada adanya poligami. dan perkawinan poligami yang terjadi di Desa ini belum bisa berbuat adil terhadap istri dan anak-anaknya. Saran saya jangan ada laki-laki yang berpoligami hanya karena nafsu semata.¹⁰

Dari wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa poligami yang terjadi di Desa Taeng sifatnya tidak resmi, karena mereka melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Dampak yang di timbulkan dari poligami tersebut tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tanggapan menegani setuju atau tidaknya poligami yang terjadi di Desa Taeng, semua reponden tidak setuju dengan adanya poligami.

⁸Fatmawati (26 tahun), Guru, Wawancara, Gowa 15 Juli 2019

⁹Syahmini, (48 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Gowa 15 Juli 2019.

¹⁰Ramlah, (42 tahun), Wirausaha, Wawancara, Gowa 15 Juli 2019.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap istri pertama ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh poligami terhadap kehidupan rumah tangga, diantaranya:

1. Istri merasa sakit hati

Istri akan merasa sakit hati bila mengetahui, mendengar dan melihat suaminya menikah dengan perempuan lain.

Hasil wawancara dengan Ibu Nunung umur 39 tahun, Ibu Rumah Tangga mengungkapkan bahwa:

Ketika saya mengetahui bahwa suami saya menikah lagi (poligami) saya sangat kaget, marah, kecewa dan sakit hati. Tetapi mau bagaimana sudah terjadi dan ada anak-anak saya yang harus saya pertahankan. Di situ saya merasa bingung hendak mengadu kepada siapa, karena saya berfikir ini merupakan aib keluarga, saya ingin pulang ke kampung halaman saya tetapi sangat malu kepada keluarga. Kemudian saya hanya bisa memendam apa yang saya rasakan saat ini. Kemungkinan penyebab suami saya beristri lagi (berpoligami) saling berjauhan jadi saya tidak tau diluar dia bagaimana atau juga memang ada yang kurang dari diri saya.¹¹

Pertanyaan yang hampir sama juga disampaikan oleh Ibu Erni, umur 41 tahun, Wiraswasta menyatakan bahwa:

Bicara perasaan pastinya saya sangat sakit hati sekali, kenapa suami saya tega menikah lagi (poligami). Awal saya tau bahwa suami saya poligami, saya merasa seperti tidak menyangka, perasaan bercampur aduk, jengkel dan kecewa kalau merasakan kenyataan yang terjadi pada saya, tetapi keluarga saya tetap menenangkan saya, dan itu juga membuat saya bangkit lagi.¹²

Hasil wawancara dari ibu Majadia, umur 31 tahun, Ibu Rumah Tangga menyatakan bahwa:

Suami saya memberi tahu saya bahwa dia menikah lagi (poligami), di situ saya sangat terpukul, kecewa dan sangat sakit hati. Saya bahkan tidak tahu apa yang menyebabkan suami saya sehingga ingin menikah lagi (poligami).¹³

¹¹Nunung Nursahadah (39 tahun),Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa, 27 Mei 2019.

¹²Erni (41 tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Gowa 28 Mei 2019.

¹³Majadia, (31 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 28 Mei 2019.

Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa mayoritas dilakukan dengan alasan yang tidak jelas serta diluar dari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan membawa dampak buruk pada anak-anak mereka. Seorang anak akan merasa malu bila ayahnya beristeri lebih dari seorang (berpoligami).

2. Hilangnya rasa kasih sayang

Salah satu dampak terjadinya poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah dan anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah.

Kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya, berarti anak akan menderita karena kebutuhan batinnya yang tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya perhatian dan kontrol dari ayah kepada anak-anaknya maka akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan bebas. Dalam kebebasan ini anak tidak jarang mengalami kemerosotan moral, karena dalam pergaulannya dengan orang lain yang terpengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar.

Hasil wawancara dengan Ibu Nunung, Umur 39 tahun, Ibu Rumah Tangga mengatakan bahwa:

Sejak suami saya poligami, saya dan anak-anakku merasa kehilangan rasa kasih sayang dan perhatian, merasakan hal yang berbeda dari sebelumnya. Perhatian dan kasih sayang yang selama ini saya dapatkan dari suamiku serta anak-anakku tidak lagi sama seperti dulu bisa dikatakan tidak ada lagi.

Sekarang dia lebih fokus pada istri keduanya, dan jarang lagi memberikan perhatiannya pada saya dan anak-anaknya.¹⁴

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Erni 41 tahun, Wiraswasta, mengatakan bahwa:

Semenjak suami saya poligami, saya merasakan hal yang berbeda dari sebelumnya. Perhatian dan kasih sayang yang selama ini saya dapatkan dari suami serta anak-anakku kini sudah tidak ada lagi. Bahkan semenjak anak saya mengetahui bapaknya berpoligami dia menjadi sangat nakal bahkan dia sangat jarang masuk sekolah, karena dia pikir tidak ada yang lagi yang perhatian sama dia selain saya. Tapi saya mencoba menasehati anak saya dan menerima keadaan kami sekarang.¹⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Majadia, umur 31 tahun, Ibu Rumah Tangga, mengatakan bahwa:

Setelah suami saya berpoligami banyak hal-hal yang berbeda seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Bahkan dia membedakan kasih sayangnya dan perhatian kepada anak-anaknya, dia lebih mengutamakan anak-anaknya yang di istri keduanya.¹⁶

Berhasilnya seorang anak memang tidak lepas dari didikan dan perhatian dari ke dua orang tuanya. Namun, jika orang tua tidak memberikan perhatian dan kasih sayang pada anaknya atau keluarganya, maka anak tersebut biasa saja mengalami kemerosotan mental dan berperilaku bebas.

3. Istri dan anak akan merasa malu

Kemudian dampak poligami tanpa izin isteri juga muncul ditengah kehidupan sosial kemasyarakatan, yaitu suami yang melakukan poligami, istri dan anak merasa malu dengan apa yang telah dilakukannya. Dampak ini menghambat pergaulan sosial kemasyarakatan.

¹⁴Nunung Nursahadah (39 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 27 Mei 2019.

¹⁵Erni (41 tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Gowa 28 Mei 2019.

¹⁶Majadia (31 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 28 Mei 2019.

Hasil wawancara dengan Ibu Nunung, Umur 39 tahun, Ibu Rumah Tangga mengatakan bahwa:

Ketika saya mengetahui bahwa suami saya menikah lagi (poligami) saya sangat malu kepada tetangga dan keluarga saya. Saya merasa tidak dihargai oleh suami saya dan tidak ada artinya lagi sebagai istrinya, sampai saya berfikir mungkin ada kekurangan di diri saya sampai suami saya menikah (poligami) lagi. Anak-anak saya malu kepada temannya, sampai-sampai dia jarang ke sekolah waktu pertama dia tahu bahwa ayahnya menikah lagi (poligami).¹⁷

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Erni 41 tahun, Wiraswasta, mengatakan bahwa:

Saya sangat malu kepada tetangga-tetangga, terutama keluarga saya mengetahui bahwa suami saya beristri (poligami) lagi. Seolah-olah tidak ada artinya saya buat suami saya sampai dia tega menduakan saya, pada saat saat itu saya sangat malu sekali.¹⁸

Hasil wawancara dengan Ibu Majadia, Ibu Rumah Tangga, menyatakan bahwa:

Kalau dibilang malu, yaa saya sangat malu kepada keluarga saya setelah mengetahui suami saya menikah lagi (poligami), saya merasa sudah tidak ada artinya lagi dimata suami saya sampai dia tega menduakan saya.¹⁹

4. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga

Timbulnya rasa dengki dan terjadi permusuhan antara istri baru dan yang terdahulu karena di dasari suami biasanya lebih perhatian dengan istri barunya.

Hasil wawancara dengan Ibu Erni, 41 tahun, Wiraswasta, mengatakan bahwa:

Setelah suami saya berpoligami keluarga saya sudah tidak harmonis lagi, selalu ada pertengkaran. Saya sekarang sudah jarang menyapa suami saya, meskipun dia dirumah, jarang sekali saya bicara sama dia. Sakit rasanya ketika saya mau melayani suami saya, yang ada dalam pikiran saya cuman teringat istri mudanya.²⁰

¹⁷Nunung Nursahadah (39 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 27 Mei 2019.

¹⁸Erni (41 tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Gowa 28 Mei 2019.

¹⁹Majadia (31 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 28 Mei 2019.

²⁰Erni (41 tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Gowa 28 Mei 2019.

Pernyataan yang sama oleh Ibu Nunung, umur 39 tahun, Ibu Rumah Tangga, menyatakan bahwa:

Dulu saya mengenal dan melihat suami saya sebagai sosok yang sempurna dimata saya, sikapnya yang bertanggung jawab. Namun setelah menikah lagi (poligami) semuanya berubah, dia menjadi yang keras, gampang emosi, tidak peduli dengan saya dan anak-anak saya, dia lebih perhatian kepada istri keduanya.²¹

Timbulnya rasa dengki dan terjadinya permusuhan antara istri baru dan yang terdahulu karena di dasari suami biasanya lebih perhatian dngan istri baru, dan perasaan seperti itu biasanya juga terwaris kepada anak-anak dan masing-masing istri.

5. Timbulnya rasa benci pada anak

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi, perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya “dinodai” kecintaan kepada ayahnya yang berpoligami. Walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami dibolehkan, tetapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan. Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada bapaknya.

Hasil wawancara dengan ibu Nunung umur 38 tahun, ibu Rumah Tangga mengatakan bahwa :

Semenjak suami saya berpoligami anak saya sangat benci kepada bapaknya, karena perhatiannya lebih cenderung di anak dari istri keduanya, yang membuat anak saya marah adalah merasa dibeda-bedakan dengan anak dari istri keduanya, padahal anak saya juga butuh perhatian dari bapaknya. Perasaan benci anak saya pada bapaknya mengabaikan apa yang diperintahkan oleh bapaknya dan sangat jarang berkomunikasi.²²

²¹Nunung Nursahadah (39 tahun), Ibu Ruamh Tangga, *Wawancara*, Gowa 27 Mei 2019.

²²Nunung Nursahadah (39 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa 27 Mei 2019.

Pernyataan yang sama oleh Ibu Erni, Umur 39 tahun, Wirausaha mengatakan bahwa:

Ketika anak saya mengetahui bahwa bapaknya menikah lagi (poligami), anak-anak saya sangat marah.dan pada saat itu anaknya saya benci kepada bapaknya dan jarang berbicara lagi.²³

Pada dasarnya seorang bapak yang berpoligami harus mampu berlaku adil, baik pada keluarga pertamanya maupun keluarga keduanya. Namun jika seorang bapak tidak mampu memberikan rasa keadilannya terhadap keluarga pertamanya maka, bisa saja anak-anaknya akan menaruh kebencian terhadap bapaknya.

D. Solusi Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 terhadap Poligami yang terjadi di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa

1. Solusi hukum Islam terhadap Poligami

Al-quran adalah produk sejarah yang tak luput dari konteks sosial, budaya, dan politik masyarakat Arab di Hijaz saat itu. Alquran sesungguhnya respons Allah terhadap berbagai persoalan umat yang dihadapi Nabi Muhammad saw., kala itu. Sebagai respons, tentu Al-quran menyesuaikan dengan keadaan setempat yang saat itu diisi budaya kelelakian dominan. Untuk menurunkan ajaran etik, moral, maupun hukum, Al-quran membutuhkan waktu hingga tiga kali.

Al-quran membicarakan poligami dalam QS.Al-Nisa ayat 3 dan 129. Ayat pertama berbicara tentang kondisi yang melatarbelakangi pengaturan, syarat adil dan batas maksimal poligami dengan empat isteri. Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa seorang pria yang mampu berlaku adil boleh mengawini perempuan yang ia senangi, dua, tiga, atau empat (berpoligami). Akan tetapi apabila khawatir tidak

²³Erni (41 tahun), Wirausaha, Wawancara, Gowa 28 Mei 2019.

mampu berlaku adil maka cukup satu saja. Ayat ini tidak secara tegas membolehkan atau melarang berpoligami kecuali menetapkan sebuah syarat yaitu mampu berlaku adil.

Allah swt, justru menyerahkan pilihan itu pada pria, apakah ia mau melakukannya atau tidak. Menurut Quraish Shihab, ayat ini menjadi dasar bolehnya poligami. Namun demikian, ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum Islam. Ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.²⁴ Dari paparan ini, diketahui bahwa poligami dalam Islam sebenarnya menjadi aturan yang berlaku ketika terjadi darurat sosial, tidak dalam situasi normal dan darurat individual.

2. Solusi UU No. 1 tahun 1974 tentang Poligami

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah swt, tetapi sekaligus keduanya. Ada beberapa argument yang menolak poligami salah satu diantaranya adalah, kemampuan untuk bersikap adil, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajibab untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil, dan dampak psikologis anak-anak dari hasil pernikahan poligami, hal ini tentunya menimbulkan problem dalam kehidupan rumah tangga. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah mengatur dan memberikan pedoman dan solusi misalnya dalam kewajiban suami isteri dalam

²⁴Abdillah Mustari, *Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*, h. 174.

perkawinan poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Masalah pembagian harta juga menjadi salah satu yang sering dipermasalahkan dalam perkawinan poligami, dan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memberikan penjelasan bahwa perkawinan poligami yakni dalam pasal 94 ayat (1 dan 2) :

- a) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- b) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana dalam ayat 1 dihitung pada saat berlansungnya perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat.

Selain masalah pembagian harta, dalam UU tersebut juga mengatur penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan poligami. Masalah harta bersama suami isteri atau dengan isteri-isterinya, pengelolaannya dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis, yang berisi tentang bagaimana dan berapa yang ditanggung suami untuk masing-masing isterinya.²⁵

²⁵M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, (Cet. I, Makassar; Alauddin University Press, 2012), h. 160.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sangat memprihatinkan, karena perkawinan poligami itu dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan isteri pertama dan anak-anak mereka terlebih dahulu. Sehingga implikasi perkawinan poligami itu secara psikologis isteri akan merasa sakit hati dan juga mengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak mereka. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perkawinan poligami yang terjadi di Desa Taeng banyak menimbulkan dampak negatif dari pada manfaatnya.
2. Dampak poligami terhadap kehidupan rumah tangga yang terjadi di Desa Taeng, yaitu:
 - a. Istri merasa sakit hati
 - b. Hilangnya rasa kasih sayang
 - c. Istri dan anak akan merasa malu
 - d. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga
 - e. Timbulnya rasa benci pada anak

B. Implikasi Penelitian

Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan, maka berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi yang ingin melakukan perkawinan poligami hendaklah berpikir beribu-ribu kali, karena secara umum perkawinan poligami itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik. Selain itu poligami juga mengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak. Terkadang dengan satu orang isteri saja kita sering juga dilanda oleh masalah-masalah dalam rumah tangga, lalu kita jadikan poligami sebagai solusinya justru akan menambah masalah baru. Secara akal sehat mengatakan jika satu isteri belum beres apalagi lebih dari satu malah akan lebih rumit lagi.
2. Kemudian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kejanggalan, kekurangan dan kesalahan baik dari segi isi maupun segi sistematika penulisanNya, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar tercapainya kualitas penulisan skripsi di masa yang akan datang dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Taqyudin, *Kifayat al-akhyar fi halli ghayat-al ikhtisthar*, Dar al-kahir (Damaskus: Dar-al khair), cet I.
- Al-Azhar, *Dar al-Kutub Al-Islamiyah*, Bulugul Maram. Jakarta: Publisher, t, th ,Juzu' 3.
- al-Islamiyah, *Dar al kutub*. Bulugul Maram. Jakarta: Publisher, t.th.
- Aj-Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Presepsi*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Almanar, Tim. *Panduan Syar'i Menuju Rumah tangga Islami*. Bandung: Cipta Media, 2003.
- Anshari. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajem en, dan Pemasaran*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Pnelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Cet IX; Kencana: Jakarta, 2005.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2006.
- Hartono,Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Mandar maju, 1990.
- al-Iraqy, Butsainan as-Syyid. *Rahasia Perkawinan yang Bahagia*. Cet I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Kitab Sunan Abu Daud, *Bab Nikah Hadis 2133*.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2013
- al-Khayyath, M. Haitsam. *Problematika Muslimah di Era Modern*. Erlangga, 2007.

- Kristanto, Vigih Hery. *Metodologi Penelitian Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Cet. I; Yogyakarta: Deepbulish, 2018.
- Luth, Thohir. *Syariat Islam Menjawab Pertanyaan Umat sebuah Konfigurasi Tanya Jawab Seputar Fiqih Realitas di Indonesia*. Cet. I; Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Maloko, M. Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Cet. I, Makassar; Alauddin University Press, 2012.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muh.Said, Nurhidayat *Metode Penelitian Dakwah*. Cet. I; Makassar; Alauddin University Press, 2013.
- Mustari, Abdillah. *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Purdawarminta, W. Js. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet IV Jakarta: Depdikbud, 1976.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahman*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saebani, Beni ahmad. *Fiqh Munakahat II* Cet V; Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016.
- Salim, Hidayah. *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*. Cet VII; Bandung; Remaja Rosdakarya Offset, 1994.

- Sembiring, Rosdinar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Cet. I; Jakarat: Sinar Grafika, 2002.
- Suadi, Amran. Candra, Mardi. *Politik Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syaria* Cet II; Jakarta: Kencana, 2016.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektoer Pelayanan Publik*. Cet.IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sutinah, dan Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Cet.I; Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Tarigan, Azhari Akmal dan Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Tatapangarsa, Humaidah. *Hakikat Poligami Dalam Islam*. Surabaya: Usaha Nasional, 1977.
- Thalib, Muhammad. *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*. Bandung: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Yahya, Muhammad. *Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi SAW*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Sirih dan Permasalahannya ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*. Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Zuhrah, Fatimah. *Problematisasi Hukum Poligami di Indonesia*. Jurnal Islam dan Sains, vol. 3 no. 01 Juni 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“FENOMENA POLIGAMI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU Perkawinan) di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”** bernama lengkap **NUTFIRAH**, Nim: **10300115115**, Lahir di Sungguminasa, 24 Januari 1997, Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak **Khaeruddin Nurdin** dan Ibu **Kamsiah Nurdin**.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri Taeng tahun 2003-2009. Penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Pallangga tahun 2009-2012, dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Sungguminasa, sekarang SMA Negeri 1 Gowa tahun 2012-2015.

Kemudian tahun 2015 penulis dapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur Ujian Masuk Khusus (UMK) dan lulus di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2019.

